

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)**

(STUDY EMPIRIS DI PROVINSI PAPUA)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi



Di ajukan Oleh :

Nama : Simson Werimon

NIM : C4C 003112

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOVEMBER 2005**

Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Simson Werimon

NIM : C4C 003112

Menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan adalah karya saya sendiri, dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Perguruan Tinggi lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2005

Werimon's.

Tesis Berjudul

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Simson Werimon

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 7 Desember 2005
dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Pembimbing Utama
Anggota

Pembimbing

Prof.Dr.H. Imam Ghozali, M.com.Akt.
M.Si, Akt.

Dr. H.Mohamad.Nazir,

Tim Penguji

Drs.Sugeng Pamudji, Msi.Akt.
Ardiyanto.Msi,Akt.

Drs.Daljono.Msi.Akt

Drs. Didik

Semarang, 7 Desember 2005

Universitas Diponegoro
Program Pascasarjana
Program Studi Magister Sains Akuntansi
Ketua Program

Dr. H.Mohamad.Nazir, M.Si, Akt.

NIP. 131 875 458

Motto & Persembahan

*Tetapi kuduskanlah Kristus Didalam Hatimu Sebagai
Tuhan ! dan Siap Sedia Pada Segala Waktunya
untuk Memberi Pertanggung Jawaban Kepada Tiap-
tiap Orang Yang Meminta Pertanggung Jawab Dari
Kamu Tentang Pengharapan Yang Ada Padamu,
Tetapi Harus Dengan Lemah Lembut dan Hormat.*

1. Petrus 3:15

Ka Persembahan Buat:

Istri dan Anak-anakku Tercinta.

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini, penulis memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kasih setiannya memberikan, hikmat, pengertian dan akal budi serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih Kepada :

1. Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis hingga Dapat Menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang.
2. Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua, yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai sponsor utama dalam pembiayaan Studi penulis.
4. Dirjen Dikti sebagai sponsor kedua dalam Pembiayaan Studi penulis.
5. Bapak Prof Dr.H. Iman Ghozali, M.Com.Akt, selaku pembimbing Utama, dan Bapak Dr.H.Mohamad Nasir, Msi, Akt, selaku Pembimbing kedua, yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, beserta staf Admisi dan karyawan lainnya.
7. Team Reviewer Drs.Sugeng Pamuji, Msi.Akt.Drs.Daljono,Msi.Akt Drs. Didik Ardiyanto.Msi,Akt.
8. Terima kasih kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan kabupaten Sorong, Kota Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Serui, yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk mengisi kuesioner . Terima kasih pula kepada staf Sekretariat Dewan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan kabupaten Sorong, Kota Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Serui, atas kerjasamanya.
9. Secara Pribadi penulis mengucapkan terimakasih kepada Istri saya, Paulin, yang dengan sabar mendampingi penulis melakukan penelitian, terima kasih

juga atas dukungan, pengertian dan kebesaraniwanya. Terima kasih pula Penulis ucapkan pada Bpk.Pdt. Abraham Ungiriwalu atas dukungan Doanya dan juga kepada keluarga besar “Werimon dan Rumayomi Basudara” di Jayapura dan Manokwari, khususnya Bapak/Mama yang tak henti-henti mendoakan penulis agar tercapai impiannya, Kakak dan adik-adik yang baik (Tony, Hermyn, Achel, Iysa, Chalynego, dan Chroline dan *security* pustaka pribadi ‘*pace*’ Upeg), yang telah memberikan dukungan baik material maupun *espirite*, dan pengertiannya selama ini.

10. Teman-teman Maksi Angkatan IX, Mas Dwi, Mas Tris, Pak Igede, Pak Jalil, Ibu Eka, Ibu Rini, Ibu Tutik, Mbak Yanti, Audrey, Puji dan Nia, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang dibina selama ini.

11. “Sa” ”Pu”Rekan-rekan seperjuangan, ”*dong smua*” *Andress, MB, Hugo, Yosi, Arwam, Yan & Timo* “*deng*” “*dong*” di Lempong Sari I, 382. ‘*Pace Chandra, Pace Ehu* “*deng*” *Juli*.

Akhirnya dari penulisan ini, penulis berharap bahwa tesis ini mempunyai kontribusi pemikiran terhadap terciptanya *good governance* bagi tata pemerintahan, tegaknya *law Enforcements* dan penguatan *civil society* demi terciptanya masyarakat demokratis dan berkeadilan di Bumi Pertiwi dan Bumi Cendrawasih tercinta.

Semarang November 2005

Penulis

Wermon’S.

Abstract.

The purpose of this study examined influence of public participation and public policy transparency on the relationship between budgeting knowledge council and budgeting control (APBD), which moderating by public participation and public policy transparency . Independent variable are budgeting knowledge council and dependent variable are local financial control (APBD).

The sample of study are legislative assembly at regency (DPRD) in period of 1999-2009 from all the Provinsi of Papua. The data obtained by using Purpose Random Sampling metode and respondent in this research are 313. Collecting data by direct survey at the area of attainable, mail survei and contanck person for area of unattainable. Hyphothesis are tested empirically used multiple regression for each sample.

The result of the study indicated that's, first, budgeting knowledge council are statics significant on local financial (APBD), with p value = 0.018, second, interaction of public participation are negative significant on the relationship between budgeting knowledge council and local financial (APBD) with p value = 0,03 and coeficien regression are = -2,403, third, interaction from transparency of public policy are not statics significant between budgeting knowledge council and local financial (APBD) with p value = 0,266, fourth, interaction of budgeting knowledge council, public participation, transparency of public policy are not statics significant on local financial (APBD), with p value = 0,266.

Key Word : Public Participation, public policy Transparency, budgeting Knowledge Council, and Local Financial (APBD).

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang di moderasikan oleh Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran dan variable dependennya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua periode 1999-2009, diperoleh dengan menggunakan teknik *Purpose Random Sampling*. Jumlah Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 313. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei langsung pada wilayah yang dapat dijangkau dan mail survei serta kontak person secara khusus pada wilayah tidak dapat dijangkau. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan *multiple regression* untuk masing-masing sample.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada level (*p value*) 0.018. Kedua interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan melihat nilai signifikansinya (*p value*) sebesar = 0,03 dengan koefisien regresinya bernilai -2,403, ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (*p value*) sebesar = 0,266, ke empat interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (*p value*) sebesar = 0,266.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran, pengawasan keuangan daerah (APBD).

Daftar Isi

	<i>hal</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian	iii
Moto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar lampiran	xiv
BAB .I.	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika penulisan	11
BAB .II.	
TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2. Landasan Teori.....	12
2.1. Persepsi	12
2.2. Pengertian Keuangan Daerah.....	16
2.3. Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah	18
2.4. Peran Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat dalam Proses APBD.....	23
2.5. Pengawasan Keuangan Daerah	26
2.6. Kerangka Konseptual	29
2.7. Hipotesis Penelitian	30
1. Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah.....	30
2. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah.....	32
3. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah.....	36
4. Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD)	38
BAB. III.	
METODE PENELITIAN	

3.1.	Desain Penelitian	39
3.2.	Populasi dan Sampling Penelitian	40
3.3.	Variabel Penelitian dan Defevinisi Operasional Variabel	41
3.4.	Instrumen Penelitian	43
3.5.	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.6.	Prosedur Pengumpulan Data	45
3.7.	Tekhnik Analisis Data.....	45
BAB .IV.		
HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Data Penelitian	47
1.	Demografi Responden	47
2.	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	55
3.	Uji Reabilitas	56
4.	Uji Validitas	57
5.	Pengujian Asumsi Klasik.....	59
4.2.	Hasil Penelitian	63
1.	Pengujian Hipotesis I	63
2.	Pengujian Hipotesis II.....	64
3.	Pengujian Hipotesis III.....	65
4.	Pengujian Hipotesis IV	66
4.3.	Pembahasan	68
1.	Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah	68
2.	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.....	70
3.	Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.	72
4.	Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).....	74
BAB.V.		
PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan.....	76
5.2.	Keterbatasan.....	77
5.3.	Saran dan Implikasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN		86

DAFTAR GAMBAR

	<i>hal</i>
Gambar 2.1. 1. Mekanisme Penyusunan Anggaran (APBD)	22
Gambar 2.1.2. Peran Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Anggaran (APBD)	26
Gambar 2.1.3. Kerangka konseptual	30
Gambar 2.1.4. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat	32
Gambar 4.1. Graffik <i>Scartter Plots</i>	61

DAFTAR TABEL

	<i>hal</i>
Tabel. 4.1.1. Anggota DPRD Kabupaten Se-Papua.....	48
Tabel 4.1.2. Ringkasan perhitungan Populasi, sampel dan <i>respond rate</i> (rr) penelitian.....	49
Tabel 4.1.3. Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	50
Tabel. 4.1.4. Wilayah Responden.....	50
Tabel. 4.1.5. Usia dan Jenis kelamin Responden.....	51
Tabel. 4.2.1. Jenjang Pendidikan Responden.....	52
Tabel. 4.2.2. Pekerjaan Responden.....	53
Tabel. 4.2.3. Jabatan Responden dan Komisi-komisi.....	54
Tabel. 4.2.4. Keanggotaan Fraksi dan Lama menjabat.....	55
Tabel. 4.2.5. Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan, Partisipasi,Transparansi dan Pengawasan.....	55
Tabel. 4.3.1. Hasil Uji Reabilitas	56
Tabel. 4.3.2. Hasil Uji Validitas.....	57
Tabel. 4.3.3. Hasil Uji CFA.....	58
Tabel. 4.3.4. Hasil Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel. 4.3.5. Hasil Uji Durbin Watson.....	61
Tabel. 4.4.1. Hasil Uji Normalitas Data.	62
Tabel. 4.4.2. Hasil Regresi Hipotesis Pertama	64
Tabel. 4.4.3. Hasil Regresi Hipotesis Kedua.....	65
Tabel. 4.4.4. Hasil Regresi Hipotesis Ketiga.	66
Tabel. 4.4.5. Regresi Hipotesis Keempat.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>hal</i>
I Permohonan Menjadi Responden	85
II Kuisioner Penelitian	89
I Data Screening dan Transformasi Data	
1. Uji normalitas data dengan Menggunakan Uji KS	92
II Uji normalitas dengan grafik	
2.1.Grafik Pengetahuan Dewan Sebelum dan Sesudah dikeluarkan Data Outlier.....	93
2.2.Grafik Partisipasi Masyarakat	93
2.3.Grafik Transparansi Kebijakan Publik	93
2.4. Uji K-S setelah Data Outlier dikeluarkan	93
III Uji Reabilitas	
3.1.Reliability Pengetahuan Dewan.....	94
3.2.Reliability Partisipasi Masyarakat	95
3.3.Reliability Transparansi Kebijakan Publik	96
3.4.Reliability Pengawasan APBD.....	98
IV Uji Validitas	
4.1.Correlations Pengetahuan Dewan	100
4.2.Correlations Partisipasi Masyarakat	101
4.3.Correlations Transparansi Kebijakan Publik.....	102
4.4.Correlations Pengawasan APBD.....	103
V Analisis Faktor	
5.1.Factor Analysis Pengetahuan.....	104
5.2.Factor Analysis Partisipasi	105
5.3.Factor Analysis Transparansi	106
5.4.Factor Analysis Pengawasan	107
VI Asumsi Klasik	
6.1.Uji Multikolonieritas	108

6.2. Uji Autokorelasi (DW).....	109
6.3. NPar Tests(Run Test).....	109
6.4. Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik	109
6.5. Uji Normalitas dengan Grafik	110
6.6. Uji Normalitas dengan Menggunakan Analisis Statistik	110

VII Regresi

7.1. Regression Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dgn Pengawasan APBD oleh Dewan	111
7.2. Uji Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan APBD oleh Dewan.	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Kedua

perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yang timbul akibat adanya krisis tersebut adalah tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dan taraf kehidupan masyarakat

yang semakin menurun. Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dari krisis tersebut adalah munculnya reformasi disegala bidang khususnya bidang pemerintahan yang menuntut terciptanya *good and client governance* (Mardiasmo, 2002). Salah satu bagian dari reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai wakil rakyat menghasilkan beberapa ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1997 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yang terdiri dari :

- 1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Anggaran antara Pemerintahan Pusat dan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejak ditetapkannya UU No. 22/1999 sampai diterbitkannya UU No.33 Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2004, telah terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki *power*. Dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah pada ketentuan umum pasal 1

ayat 2, disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sementara pada pasal 5, yang dimaksud dengan dengan kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah atau Walikota bagi daerah kota, dan pada ayat 5, yang dimaksud dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 22/1999 dan ditetapkannya UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, DPRD terkesan hanya memberikan pengesahan atas rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Namun sekarang, kedudukan DPRD menjadi semakin tinggi karena DPRD mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam menentukan anggaran, termasuk kontrol terhadap penggunaan anggaran.

Dipihak lain dengan adanya otonomi daerah telah berakibat pada perubahan serta paradigma baru dalam proses pembuatan anggaran, sehingga nuansa transparansi dan partisipasi dalam pembuatan anggaran sudah ada perbaikan. Konsekuensi lain dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dampak lain yang muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai salah prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik diperlukan *internal control* dan *external control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari DPRD yang selanjutnya disebut Dewan menjadi semakin tinggi dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa : 1). Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan, 2). Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Peran Dewan sebagai parlemen untuk mengawasi eksekutif diharapkan dapat mencapai suatu laporan yang transparan dengan melalui prosedur *checks and balances*. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dengan tujuan agar

uang rakyat dapat dikelola dengan seoptimal mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrol kepada penguasa (pemerintah) dilakukan baik oleh lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, misalnya parlemen, media massa maupun dilakukan rakyat secara langsung. Untuk bekerjanya sistem pengawasan, selain diciptakan struktur juga dibuat mekanisme aturan main yang disepakati. Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) *Legislation function* (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2). *Budgeting function* (fungsi untuk menyusun anggaran) dan 3). *Control function* (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi Dewan yang akan dibahas adalah fungsi budgeting dan fungsi pengawasan Dewan terhadap eksekutif yang berkenaan dengan anggaran. Yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan karena pengetahuan lain. Disamping itu, apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan.

Menurut Pramono (2002), pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh Dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar yang akan memperkuat fungsi pengawasan oleh Dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (eksekutif).

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan. Pengaruh yang terjadi adalah positif. Artinya, semakin tinggi pengetahuan anggaran yang dimiliki Dewan maka pengawasan yang dilakukan akan meningkat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2002) menyebutkan, bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan Pendidikan, Pengetahuan, Pengalaman, dan Keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan penelitian berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Asumsinya adalah keterlibatan masyarakat dan transparansi yang dilakukan oleh eksekutif dalam siklus anggaran akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) yang menguji Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sopanah (2003). Komitmen Pemerintahan yang baru, untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik serta Ketidaksignifikan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah yang merupakan tuntutan agenda reformasi, menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji kembali.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah terletak pada sampel dan unit analisis, dimana peneliti terdahulu menggunakan 2 sampel yaitu sample Dewan dan sample masyarakat sebagai responden, tetapi dalam penelitian yang dilakukan saat ini hanya menggunakan sample dewan sebagai responden dengan alasan waktu dan luasnya wilayah penelitian. Unit analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pada komisi A, komisi B dan komisi C, tetapi berdasarkan UU.Otonomi Daerah No.32 thn 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 46 (ayat) 1, tentang alat dan kelengkapan DPRD, terdiri atas ; Pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, dan badan kehormatan yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran, maka dalam penelitian ini, digunakan seluruh anggota Dewan sebagai unit analisis.

1.2. Perumusan Masalah

Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003), menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Permasalahan selanjutnya dalam penelitian ini adalah apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan transparansi kebijakan publik sebagai obek pemersepsi dapat merubah perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) ?

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) ?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) ?
4. Apakah Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji:

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Pengaruh interaksi Partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Pengaruh Interaksi Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
4. Pengaruh interaksi Pengetahuan Dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran

(APBD) yang akan diperkuat atau diperlemah dengan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan. Sementara bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government*).

1.5. Sistematika Penulisan

Pada BAB 1, disajikan latar belakang masalah yang timbul sejalan dengan bergulirnya reformasi dan krisis ekonomi sebagai akibat penyelenggaraan pemerintahan yang belum dikelola dengan baik dan berakibat pada krisis kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan. Pada sub bab selanjutnya disajikan pernyataan masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

Permasalahan diatas memerlukan pendalaman materi dan kajian teoritis. Sehingga dalam BAB II akan disajikan telaah literatur dan pengembangan hipotesis yang meliputi, Pengertian Keuangan Daerah, Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah, Peran Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat dalam Proses APBD, Pengawasan Keuangan Daerah, Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tranparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta hasil-hasil Penelitian Terdahulu.

Pada BAB III disajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Desain Penelitian, Populasi dan Sampling Penelitian, Variabel Penelitian dan Defevinisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian serta Tekhnik Analisis Data.

Pada BAB IV disajikan analisis data penelitian yang mencakup data profil responden, statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB II

Telaah Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2. Landasan Teori

2.1. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Siegel dan Marconi (1989) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana masyarakat melihat atau menginterpretasikan kejadian-kejadian dan tujuan-tujuan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut Siegel dan Marconi mengemukakan bahwa definisi formal atas persepsi adalah sebuah proses dimana kita melakukan seleksi, pengorganisasian dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna dan gambaran koheren atas dunia. Menurut Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) dikatakan bahwa persepsi adalah sebuah proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh indera. Gordon (1991) mendefinisikan persepsi sebagai proses penginderaan yang kemudian menghasilkan pemahaman dan cara Pandang manusia terhadapnya.

Seleksi dalam proses persepsi disebabkan karena terbatasnya kemampuan indera kita untuk mengamati semua stimulus yang ada, akibatnya seseorang harus dapat memilih untuk menentukan persepsi, yang bagi dia sangat menarik dan penting. Apa yang kita pilih untuk diamati

tergantungan pada sifat stimuli tersebut, perkiraan kita dan motivasi kita. Akibat dari proses seleksi ini kita akan mengabaikan stimuli yang lain. Pengorganisasian dalam proses persepsi disini adalah mengorganisasikan stimuli menjadi kelompok-kelompok dan mengamatinya sebagai sesuatu yang bersatu. Jika diberi informasi yang tidak lengkap, masyarakat akan berusaha mengisi gap tersebut dan kemudian berlaku sebagai mereka yang memiliki informasi yang lengkap tentang situasi tersebut.

Interpretasi persepsi tergantung pada pengalaman masa lalu dan keanggotaan dalam kelompok sosial. Ketika stimuli ambiguous, maka masyarakat akan menginterpretasikannya dalam sesuatu yang mana hal itu konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, kepentingan-kepentingan dan sikap-sikap mereka. Menurut Siegel dan Marconi (1989) Pengalaman masyarakat di dunia ini berbeda disebabkan persepsi yang tergantung pada Stimuli fisik (*Physical stimuli*) dan Keadaan mudah terpengaruhnya individual (*Individual Predispositions*). Stimuli fisik adalah masukan-masukan sensorik seperti penglihatan suara dan sentuhan. Sedangkan *Individual predispositions* termasuk alasan-alasan, kebutuhan-kebutuhan, sikap, pembelajaran yang lalu dan ekspektasi. Sedangkan menurut Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam persepsi adalah pengakuan pola (*pattern recognition*) dan perhatian (*attention*). Pengakuan pola meliputi proses mengidentifikasi *stimulus* yang kompleks yang dipengaruhi oleh konteks dan pengalamana masa lalu. Sedangkan perhatian merupakan konsentrasi dari aktivitas mental, yang melibatkan pemrosesan lebih lanjut atau suatu *stimuli* dan dalam waktu bersamaan tidak mengindahkan *stimuli* yang

lain. Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, walaupun tampak perbedaannya, namun perbedaan tersebut hanya pada penekanannya atau fokus yang digunakan oleh para ahli di bidang perilaku. Akan tetapi dari semua definisi yang ada dapat diambil kesamaan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang dimulai dari pemilihan *stimuli*, merespon *stimuli* dan memproses secara rumit (sering disebut proses *kognitiv*), kemudian menginterpretasikan dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan dan menafsirkannya. Hasil dari proses pembentukan persepsi ini akhirnya akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu.

Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal Baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan. Dalam mempelajari persepsi, tentunya tidak lepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyatakan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu, didasarkan dari mana perilaku itu timbul secara internal atau eksternal. Tetapi penentuan ini tergantung pada kekhususan (*distinctiveness*), konsesus dan konsistensi. Perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu bersumber pada internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu terpaksa berperilaku itu oleh situasi.

Kekhususan merujuk kepada apakah seseorang individu memperagakan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Jika perilakunya luar biasa, kemungkinan besar pengamat itu memberikan atribusi eksternal kepada perilaku itu. Jika tindakan ini tidak luar biasa, agaknya itu akan dinilai sebagai bersifat eksternal.

Konsensus ditunjukkan dengan respons yang serupa dalam situasi yang sama. Sedangkan konsistensi dalam perilaku ditunjukkan apakah seseorang akan memberi respons dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Akan tetapi terdapat penemuan yang cukup menarik dari teori atribusi bahwa terdapat kekeliruan atau prasangka yang menyimpang atau memutar balik atribusi. Misalnya seperti dalam melihat suatu kesuksesan, seseorang cenderung untuk mengabaikan faktor eksternal, dan lebih mengutamakan faktor internal, sebaliknya untuk kegagalan seringkali faktor eksternal yang dipersalahkan.

Teori diatas, cukup relevan untuk menjelaskan bahwa dewan dalam melaksanakan fungsi pengasawasan anggaran (APB) terdapat proses pembentukan persepsi terdapat proses seleksi, dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian, dan proses penginterpretasian atas *stimuli* yang diterima. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran serta Transparansi kebijakan publik merupakan objek pembentuk persepsi dari dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu fungsi pengawasan. Harapannya adalah ketika terjadi reformasi anggaran pada sektor publik dan tuntutan

penyelenggaraan pemerintah yang transparan, maka diharapkan Dewan dapat menginterpretasikan *stimuli* yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998).

2.2. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut pada bagian penjelesan atas undang-undang tersebut pada angka (3) tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah, semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, dari sisi subyek meliputi seluruh obyek yang dimiliki Negara, dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban, sedangkan dari sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penugasan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana negara dapat dianalogikan dengan daerah. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichksan et.al 1997). Sementara Fatchurrocmann (2002) menyebutkan batasan keuangan negara yang lebih luas, yaitu segala harta milik kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena kekayaan itu yang dikelola oleh pejabat negara, lembaga pemerintahan umum, yang dikuasai atau diurus oleh bank pemerintah, yayasan pemerintah dengan status hukum publik atau perdata, perusahaan negara dan usaha dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus, seperti kontrak manajemen, perjanjian dengan penyertaan pemerintah atau penunjukan pemerintah.

Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kewenangan dan kemampuan yang

memadai dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. UU No.33 Th.2004 tentang Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,b) Dana perimbangan. c) lain-lain pendapatan, Sedangkan pembiayaan bersumber dari ; a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. b) Penerimaan pinjaman daerah, c) Dana cadangan Daerah, d) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.3.Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah (APBD)

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintah daerah adalah penyusunan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan anggaran daerah merupakan uang rakyat yang dititipkan kepada daerah untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik sehingga menyangkut hajat hidup orang banyak. Bila kualitas pengelolaannya rendah, maka kebutuhan publik tidak optimal apalagi jika terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti adanya korupsi dan manipulasi. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat diharapkan akan menghasilkan anggaran yang aspiratif artinya apa yang dianggarkan dalam APBD adalah mencerminkan kebutuhan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Selain masyarakat terlibat dalam penyusunan APBD atau bisa disebut anggaran, diharapkan masyarakat juga mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jika masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat secara langsung dalam pengawasan anggaran. Berikut ini adalah tahap-tahap yang harus dilalui pada saat penyusunan APBD:

1.Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD

Proses penyusunan arah dan kebijakan umum anggaran daerah adalah sebagai berikut :

a. Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Tujuan dari penjaringan aspirasi masyarakat antara lain :

- (1). Mengeksplorasi data/informasi dari masyarakat
- (2). Mendiskripsikan aspirasi masyarakat
- (3). Memaparkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rencana Strategi Daerah (Renstra), DPRD menyusun pokok-pokok pikiran sebagai masukan untuk merumuskan arah dan kebijakan umum APBD.

- b. Pemerintah Daerah (Pemda) merumuskan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran daerah berdasarkan : (1). Pokok-pokok pikiran DPRD, (2). Arah, mandat dan pembinaan dari pemerintahan atasan, (3). Data historis, (4). Rencana Strategi Daerah (Renstrada), dan (5). Hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemda.
- c. DPRD bersama Pemda menentukan kesepakatan mengenai Arah dan Kebijakan Umum Anggaran daerah.

2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

Berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran daerah yang telah disepakati tersebut, Pemda (dapat dibantu Tim Ahli) menyusun strategi dan prioritas anggaran daerah yang selanjutnya dikonfirmasi kepada DPRD.

3. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan strategi dan prioritas anggaran daerah, Pemda melalui forum warga yang terdiri dari satuan-satuan unit kerja dan warga masyarakat menyusun rencana program dan kegiatan untuk menjadi masukan tim anggaran eksekutif dan unit kerja dalam penyusunan rencana anggaran daerah.

4. Penerbitan Surat Edaran

Berdasarkan masukan dari forum warga, tim anggaran eksekutif menerbitkan Surat Edaran yang dikirim kepada setiap unit kerja sebagai Pedoman Penyusunan rencana Anggaran Daerah. Surat Edaran tersebut antara lain memuat : Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyusunan Anggaran, Plafon Anggaran, Tolak Ukur Kinerja Unit Kerja, Formulir Memoranda Anggaran dan Standar Analisa Belanja.

5. Penyusunan Pernyataan Anggaran

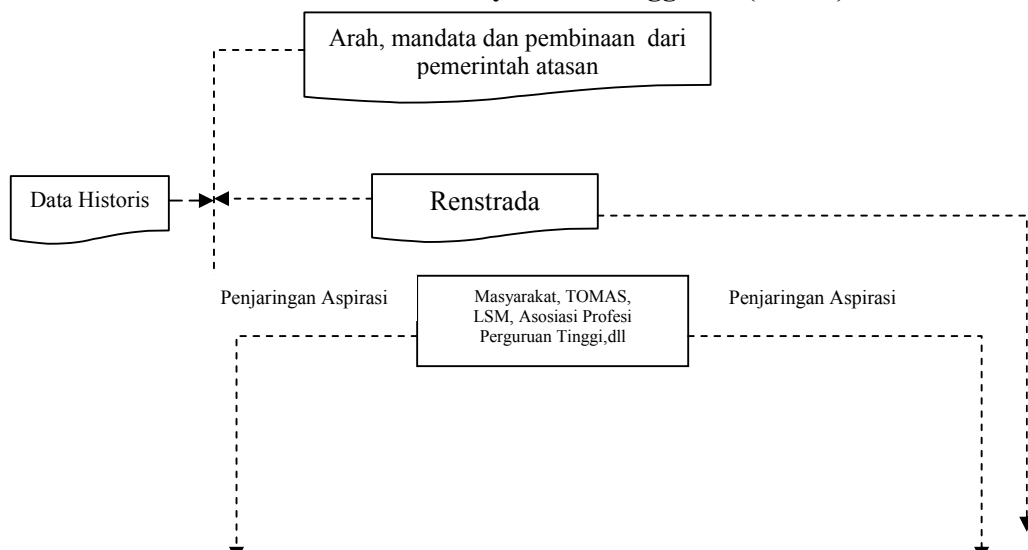
Pernyataan anggaran atau memoranda anggaran merupakan dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh setiap unit kerja berdasarkan surat edaran dari Tim Anggaran Eksekutif. Dokumen memoranda berisi usulan program, kegiatan dan rancangan anggaran unit kerja sesuai dengan tugas

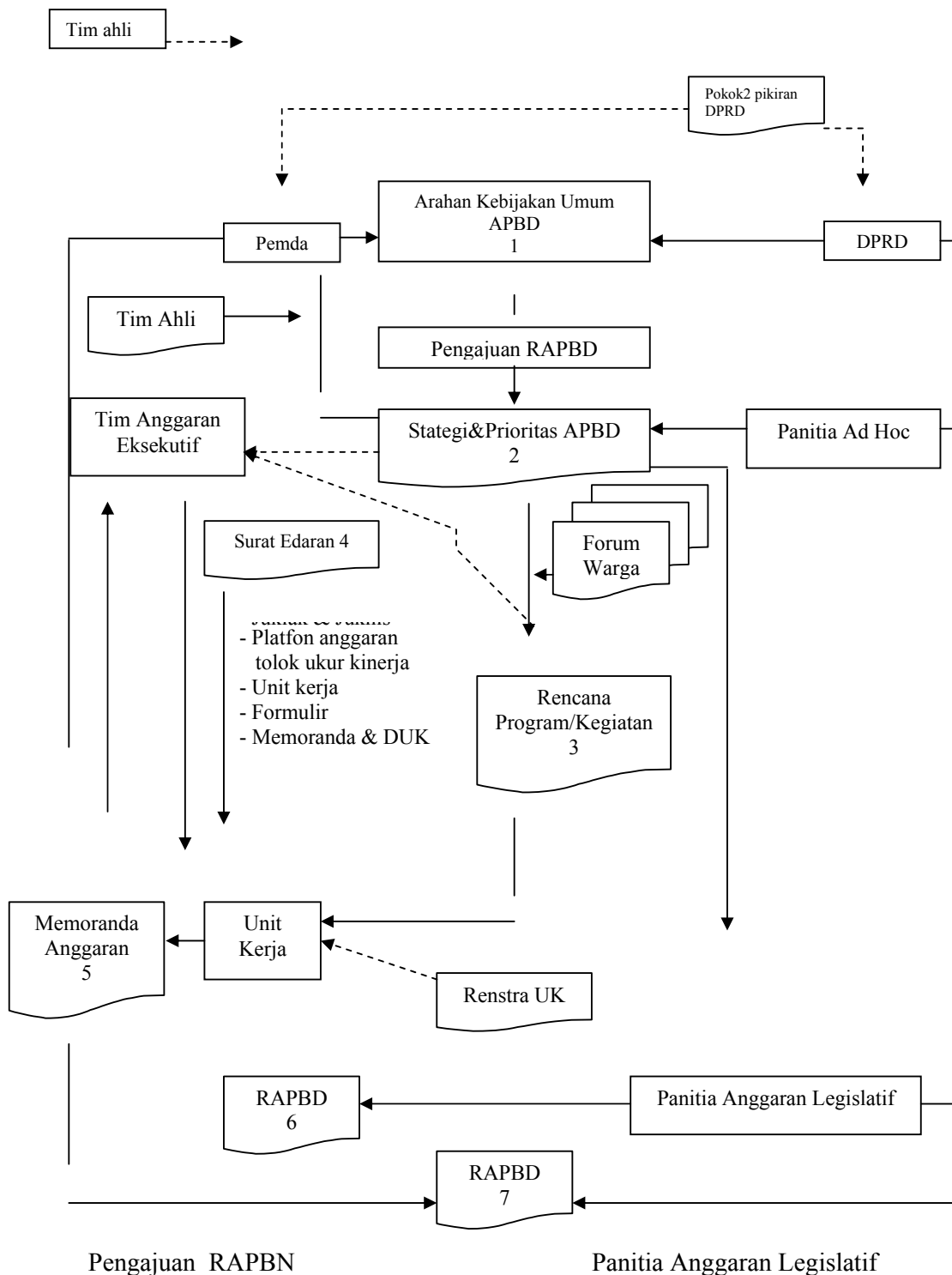
pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. Rencana Strategi Unit Kerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan memoranda anggaran.

6. Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Tim Anggaran Eksekutif melakukan evaluasi terhadap memoranda anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara rencana program, kegiatan dan anggaran unit kerja dengan arah kebijakan umum, serta strategi dan prioritas anggaran daerah. Jika diperlukan tim anggaran eksekutif dapat meminta unit kerja untuk menyempurnakan memoranda anggaran. Selanjutnya berdasarkan memoranda anggaran yang telah dievaluasi, tim anggaran eksekutif menyusun rencana anggaran daerah antara tim eksekutif dengan panitia anggaran legislative. Mekanisme penyusunan APBD dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. : Mekanisme Penyusunan Anggaran (APBD)





Sumber: Mardiasmo : *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah* (2002)

2.4. Peran Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat dalam Proses APBD

1. Pada Tahap Penyusunan

Peran Pemda pada saat penyusunan APBD adalah menyusun rancangan APBD yang kemudian diusulkan kepada Dewan untuk mendapat persetujuan. Untuk itu, Pemda harus benar-benar serius menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan Dewan dalam menghadapi kendala-kendala yang juga sedang akan dihadapi oleh Pemda. Peran aktif Pemda diantaranya : (1). Menyerap informasi melalui hasil penelitian dan dengar pendapat dengan DPRD maupun langsung dengan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda. (2). Mengkoordinir satuan kerja teknis atau dinas-dinas terkait dibawahnya untuk mempersiapkan usulan-usulan kegiatan dibidangnya. (3). Menyiapkan bahan-bahan rancangan APBD untuk diusulkan kepada masyarakat melalui DPRD lengkap dengan sasaran alokasi anggaran biaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peran Dewan dalam tahap penyusunan adalah memberikan legitimasi sehingga APBD yang telah disusun mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat yang diwakilinya. Peran Dewan tersebut sangat dibutuhkan karena independent telah ikut membantu Pemda untuk secara obyektif melihat persoalan yang melingkupi kinerja pengelolaan keuangan di daerah. Peran masyarakat dalam tahap penyusunan adalah memberikan masukan berupa aspirasi dan kebutuhannya yang dapat dikoordinir oleh instansi musyawarah pembangunan desa dan kelurahan. Selanjutnya rekap pada tingkat kecamatan diinventarisir pada tingkat Kabupaten/Kota. Adanya prinsip *bottom-up* menjadikan anggaran pembangunan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat karena mempunyai semangat transparansi dan akuntabilitas.

2. Pada Tahap Pelaksanaan

Peran Pemda pada tahap pelaksanaan APBD memasuki tahapan teknis yang langsung bersinggungan dengan semua kemungkinan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target APBD baik disektor pendapatan maupun disektor pengeluaran atau belanja daerah. Fungsi Pemda dalam tahap ini diantaranya : (1). Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar menghasilkan kinerja pengelolaan daerah yang memadai, (2). Mengontrol dan mengendalikan target penerimaan pendapatan daerah, pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan, (3). Memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara transparan atau terbuka dan dapat dipercaya, baik kepada DPRD, Pemerintah Pusat maupun masyarakat. Peran dewan pada tahap ini adalah mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemda. DPRD adalah mitra kerja bagi Pemda dalam rangka meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemda.

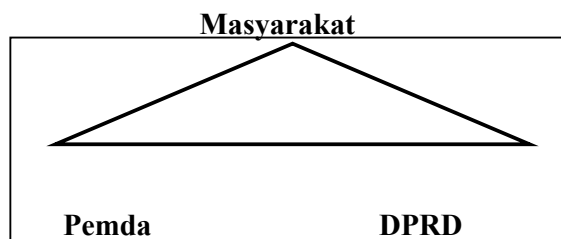
Sementara peran masyarakat pada tahap ini adalah mengoptimalkan pencapaian target-target APBD yang telah disusun. Dengan semakin luasnya kesempatan usaha masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah, serta dengan kesadaran bahwa APBD merupakan refleksi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat sehingga diharapkan mereka dapat melaksanakan kewajibannya dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah.

3. Pada Tahap Pertanggungjawaban

Peran Pemda pada tahap pertanggungjawaban adalah menyiapkan laporan mengenai segala sesuatu yang telah dicapai serta mampu menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang melatarbelakangi kinerja secara terbuka dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Peran DPRD adalah menentukan apakah RAPBD yang telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh Pemda sesuai dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan atau sebaliknya menolak laporan yang disampaikan kepada DPRD.

Sementara peran dari masyarakat adalah memberikan penilaian terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja laporan APBD yang dibuat oleh Pemda. Dari laporan tersebut masyarakat mendapatkan masukan untuk mengembangkan dan menyusun aspirasi lebih lanjut dan meningkatkan target APBD dimasa mendatang. Dari ketiga peran Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, masing-masing memiliki keterkaitan hubungan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.2 : Peran Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam Proses APBD



Sumber: Sopanah(2003)

2.5. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah

perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta pasal 9 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

Menurut (Bastian 2001). Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah provinsi (ITWILPROP), Inspektorat Wilayah Kota (ITWILKOT), Inspektorat Wilayah Kabupaten (ITWILKAB) Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), merupakan aparat pengawas fungsional. Badan ini secara taktis operasional berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, sedangkan secara taktis berada dibawah pembinaan kepala daerah. sedangkan secara teknis administratif berada dibawah pembinaan Mendagri (Irjen Depdagri). (Bastian 2001). Berdasarkan pasal 2 Kep.Mendagri No. 110/1991, Inspektorat mempunyai sejumlah tugas , yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintah umum, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan masyarakat dilingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah umum, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan social politik, perekonomian, kesejahteraan social, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, kekayaan Negara dan daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.
- b. Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsure atau instansi dilingkungan pemerintah daerah atas petunjuk Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan,

pembinaan social, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, dan kekayaan Negara/daerah.

d. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian, serta pengusutan dilaksanakan oleh inpektorat pembantu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pada itu, bagian tata usaha bertugas menyiapkan bahan kordinasi pengawasn dan memberikan pelayan administrative dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat.

Sedangkan menurut fatchurrochman (20020 Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian antara pengawasan dengan pihak yang diawasi tidak terdapat hubungan kedinasan. Di Indonesia fungsi pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat.

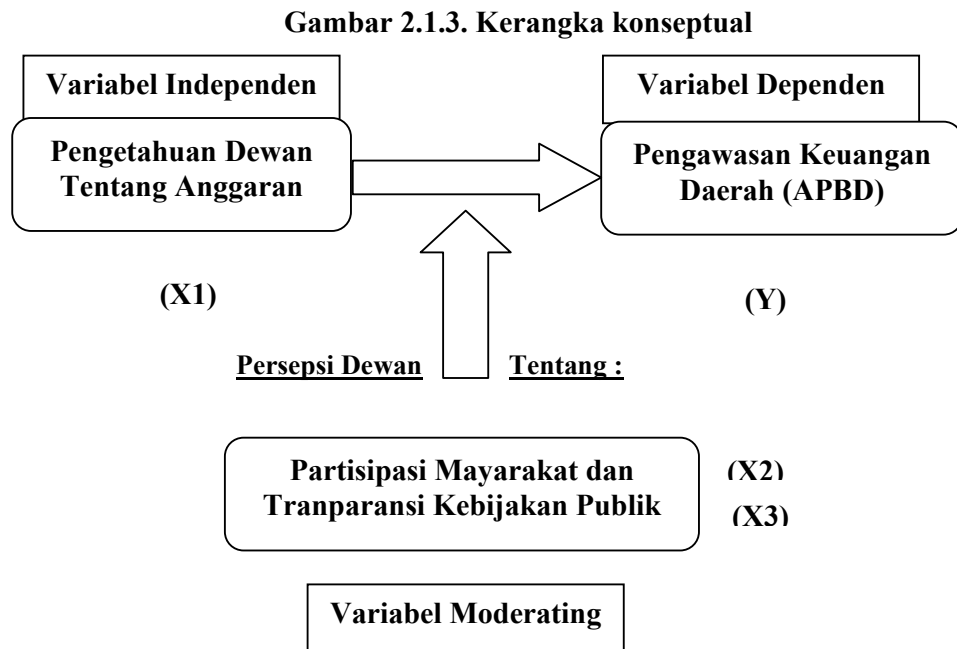
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi). Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahaan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan laporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan, Bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk : (1). Menjaga agar anggaran yang

disusun benar-benar dijalankan, (2). Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3). Menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2.6. Kerangka konseptual

Berdasarkan telaah literatur diatas maka model penelitian yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparasi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawan Keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



2.7. Hipotesis Penelitian

1. Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan, bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir

yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Sementara Salim (1991) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengetahuan erat kaitannya dengan Pendidikan dan Pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat (Truman, 1960).

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas dan posisi Dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan Dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian Dewan dalam berpolitik mewakili konsisten dan kepentingan kelompok dan partainya.

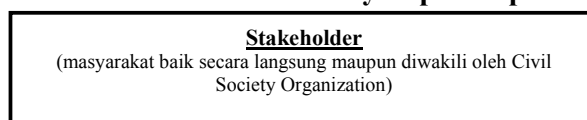
Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; 2002; Sutarnoto, 2002). Hasil-hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, Pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan, pendidikan dan penelitian berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Yudono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

HI : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

2. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun tahun 1999 (sebelum ditetapkannya UU Otsus 2004). Pada dasarnya ada tiga elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja (*performance*) pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3 berikut :

Gambar 2.1.4 : Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat





Sumber : Sopanah (2003)

Pada gambar tersebut, elemen masyarakat ditempatkan pada bagian atas kerangka segmen, sedangkan Pemerintah Daerah dan DPRD dibawah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hakikat anggaran daerah (APBD) yaitu sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, dimana nampak jelas dan dapat disimpulkan bahwa : 1) Masyarakat sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (*owner*) dan pelanggan (*customer*). 2) Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*) atau dengan kata lain sebagai manajemen.

Dobell & Ulrich (2002) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran, yakni mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*). Dalam literatur keuangan dikenal teori keagenan yang menjelaskan hubungan antar dua pihak yaitu pihak pemilik

(*prinsipal*) dengan pihak pengelola (*agen*). Salah satu hipotesis dalam teori keagenan adalah manajemen mencoba memaksimalkan kesejahteraannya dengan cara mengurangi berbagai biaya agen yang muncul dari *monitoring* dan *contracting* (Wolk, Terney & Dood, 2000). Untuk memonitor apa yang dilakukan oleh manajemen maka pemilik mengharuskan manajemen membuat laporan keuangan yang melaporkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Kalau dianalogikan pada organisasi pemerintah daerah dan DPRD dalam hal manajemen laporan keuangan yang berbasis kinerja pada hakekatnya adalah sama. Rakyat sebagai pemilik memilih wakilnya yang akan duduk di DPRD. Kemudian DPRD bersama-sama dengan eksekutif bekerja mengelola uang rakyat untuk kepentingan publik. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya maka eksekutif harus melaporkan kinerjanya kepada DPRD dan kepada rakyat. Menurut LeLoup (1986), Rubin (1993), dan Wildaysky (1975, 1984, 1991), penganggaran merupakan suatu proses politik yang melibatkan banyak pihak. Dalam perspektif keagenan, Pemda atau eksekutif adalah merupakan agen, dan DPRD atau legislatif adalah prinsipal.

Halim (2004), Otonomi daerah juga melahirkan euforia berbagai "kebebasan" bagi rakyat banyak. DPRD sebagai wakil rakyat merasa memiliki *power* yang kuat untuk mempengaruhi kebijakan Pemda, termasuk dalam pengalokasian belanja dalam APBD yang terkait dengan kebijakan tersebut. Padahal, pengalokasian belanja sendiri dalam penganggaran kinerja pada hakikatnya didasarkan pada kebutuhan daerah (yang merupakan proksi dari kebutuhan masyarakat), yang diekspresikan dalam bentuk arah dan kebijakan umum (AKU) dan strategi dan prioritas daerah. Desentralisasi dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) menunjukkan bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat dilakukan melalui mekanisme hubungan Pemda dan DPRD (*horizontal accountability*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja-belanja merupakan hasil dari tawar-menawar (*bargaining*) dan kompromi di antara Pemda dan DPRD. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan

anggaran (Rubin, 19996). Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara aktif, pasif maupun reaktif. Metode penjangkaran secara aktif DPRD melakukan pencarian dan pengumpulan data/informasi untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Metode ini dapat dilakukan melalui kuesioner, observasi ke lapangan, dan dialog interaktif. Penjangkaran aspirasi juga dapat dilakukan secara pasif dalam arti bahwa masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan yang aktif memberikan data atau informasi kepada DPRD dan DPRD hanya menyediakan sarananya. Metode ini dapat ditempuh melalui kotak saran, kotak pos, Telepon bebas pulsa, *web-site*. Terakhir, metode penjangkaran aspirasi yang reaktif yaitu DPRD bertindak untuk menggali data/informasi lebih lanjut setelah terjadi suatu peristiwa atau kejadian tertentu di masyarakat. Metode ini dapat ditempuh melalui *hearing* dan inspeksi mendadak (sidak).

Partisipasi menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah karena didalamnya menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Achmadi dkk, 2002), semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berarti semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah. Namun kenyataan dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD). Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya partisipasi masyarakat akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah, maka peranan Dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh ketertiban masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga dapat hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H2 : *Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.*

3. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan keuangan Daerah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi public . Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Komunikasi publik menuntut usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membuka informasi yang terkait dengan aktivitas publik. Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*.

Luthfi, dkk. (2003) mengemukakan, bahwa pemerintah dikatakan transparan jika : (1) pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, (2) pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai keuangannya, (3) pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya baik secara rutin maupun insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya. Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari : 1) Adanya sistem pelaporan keuangan; 2) Adanya sistem pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*)

Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas kepada publik, salah satu alatnya adalah melalui penyajian laporan keuangan. Pemberian laporan keuangan kepada publik merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit pemerintah daerah. Laporan keuangan hendaknya menunjukkan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2003). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan

transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut : 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Untuk mengetahui bahwa apakah dengan semakin tingginya pengetahuan dewan tentang anggaran, adanya partisipasi masyarakat serta adanya transparansi kebijakan publik akan meningkatkan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan, maka perlu diuji secara simultan, sehingga hipotesis keempat dari penelitian ini adalah :

H4 : Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan. Pembahasan akan meliputi proses pengumpulan data dan pemilihan sampel, definisi dan pengukuran variabel penelitian beserta pengujian reliabilitas dan validitasnya. Pada bagian akhir bab ini, akan disajikan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam BAB II sebelumnya.

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner yang digunakan dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh sopanah (2003).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dalam bentuk persepsi responden yang diperoleh melalui pendistribusian kuisisioner secara langsung kepada responden pada masing-masing DPRD se-Papua, sedangkan data sekunder berasal dari Sekretariat Dewan Pada masing-masing DPRD se-Papua. Pengambilan data menggunakan *survey* langsung pada wilayah yang dapat dijangkau dan wilayah yang tidak dapat dijangkau peneliti menggunakan *mail survey* dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket).

3.2. Populasi dan Sampling Penelitian

Populasi adalah sejumlah elemen yang dapat digunakan untuk beberapa kesimpulan (Cooper & Emory, 1999). Besarnya populasi yang akan digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang terdiri dari 12 (dua belas) wilayah DPRD kabupaten se-Provinsi Papua sebelum diadakannya pemekaran. Data sekunder tentang jumlah anggota DPRD kabupaten diperoleh dari sekretariat DPRD pada masing-masing wilayah DPRD kabupaten secara khusus pada wilayah yang dapat dijangkau dan kontak person.

Sample adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Cooper & Emory, 1999). Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan untuk sampel Daerah/ Kabupaten adalah :

1. Kabupaten yang telah memiliki DPRD defenitif.

Adapun responden anggota Dewan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari anggota Dewan Komisi A, komisi B, Komisi C, komisi D , Panitia musyawarah, badan kehormatan dan panitia Anggaran pada 10 (sepuluh) DPRD Kabupaten dan 2 (dua) kabupaten kota di Provinsi Papua. Untuk mengantisipasi rendahnya *respon rate* peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam kuesioner disampaikan bahwa responden tidak perlu memberikan identitas, kecuali hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Peneliti memberikan penghargaan dengan cara memberikan ringkasan peneliti jika responden menghendaki.
3. Memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan oleh responden.

Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang di distribusikan melalui sekretariat DPRD kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, secara khusus wilayah yang dapat dijangkau melalui transportasi laut antara lain 2 (dua) DPRD Kota yaitu DPRD Kota Sorong dan DPRD Kota Jayapura serta 6 (enam) DPRD Kabupaten yaitu; Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak, Kabupaten serui, dan 4 (empat) wilayah yang tidak dapat dijangkau seperti Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jaya Wijaya peneliti menggunakan *mail survey* disertai dengan *contac person* kepada responden dan Kepala Tata Usaha DPRD setempat.

3.3. Variabel Penelitian dan Defivinisi Operasional Variabel

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran, variabel dependen adalah pengawasan keuangan daerah (APBD) pada tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sedangkan partisipasi masyarakat dan transparasi kebijakan publik dijadikan sebagai variabel moderating.

1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan Dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Untuk mengukur variabel

pengetahuan dikembangkan instrumen yang digunakan oleh Sopanah (2003).. Pengetahuan tentang anggaran diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) pertanyaan dengan pengukur skala likert.

2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas dan serta advokasi anggaran dan masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan. Untuk mengukur variabel Partisipasi masyarakat, dikembangkan instrumen yang digunakan oleh Sopanah (2003). Partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan 14 (empat belas) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala likert.

3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Transparansi Kebijakan Publik diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala likert.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat

penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Untuk mengukur variabel Pengawasan Keuangan Daerah digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Pengawasan Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan 24 (dua puluh empat) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala likert.

3.4. Instrumen Penelitian

a. Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

b. Uji Reabilitas

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali 2002, aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS, p132). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *One shot Measure*, karena kuisioner penelitian yang digunakan adalah kuisioner yang direplikasi dan respondennya berbeda.

One shot Measure adalah pengukuran yang dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk menguji reabilitas suatu konstruk, diuji dengan uji statistik *cronbach alpha (a)*. (Ghozali 2002, p132). Suatu

konstruksi dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.60 (Nunnally, 1967).

c. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk $df = n - 2$. (Ghozali 2005, p45).

d. Uji Confirmatory Faktor Analysis (CFA)

Untuk mengetahui bahwa suatu indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk maka peneliti menggunakan *Confirmatory Faktor Analisis (CFA)*, dengan melihat Nilai Kaiser- Meyer-Okin of *Sampling Adequacy* (KMO MSA) dan *Bartlett's test of Sphericity* (BTS). Nilai KMO yang dikehendaki harus lebih dari 0,50. (Ghozali 2005, p 49).

3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian berada pada wilayah Provinsi Papua sebelum diadakan Pemekaran, yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada 12 (dua belas) wilayah kabupaten Provinsi yaitu; Kabupaten /Kota Sorong, dan kabupaten Manokwari, kabupaten Biak, kabupaten Yapen Waropen, kabupaten Nabire, kabupaten Merauke, kabupaten Fak-fak, kabupaten Mimika, kabupaten Jayawijaya dan kabupaten/kota Jaya Pura. Waktu yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah selama 2 (dua) bulan 1 minggu, terhitung dari tanggal 11 April 2005 sampai dengan tanggal 17 Juni 2005.

3.6. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur penelitian dimulai dari pengurusan surat pengantar ijin penelitian dari Program Studi Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang. Berdasarkan surat pengantar tersebut, dilampirkan bersama kuisisioner yang didistribusikan ke setiap Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota dan setiap BAPPEDA setempat mendapat tembusan. Setelah mendapatkan izin dari bagian penelitian, surat tersebut dilanjutkan untuk memperoleh izin Sekretaris DPRD dan Pimpinan dewan. Kuesioner didistribusikan secara langsung kepada masing-masing sekretariat dewan pada wilayah yang dapat dijangkau, antara lain kabupaten sorong, kota sorong, kabupaten Yapen, Kabupaten Jayapura, kota Jayapura dan kabupaten serui.

3.7. Teknik Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan *multiple regression* untuk masing-masing sample, berdasarkan uji koefisien determinasi, uji signifikansi silmultan (F test), uji signifikansi Parameter Individual (t statistik) R square. Untuk menganalisa data, digunakan *software SPSS for window released 11.05 programe*. Adapun model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + e \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1X_2 + b_5X_1X_3 + b_6 X_1X_2X_3 + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

Y..... : Pengawasan Keuangan daerah (APBD)

a..... : Konstanta

b1, b2, b3, b4, b5,b6..... : Koefisien regresi

X1..... : Pengetahuan Tentang Anggaran

X2..... : Partisipasi Masyarakat

X3..... : Transparansi Kebijakan Publik

X1,X2..... :Interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat

X1,X2,X3..... : Interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.

e..... : Eror

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan secara berurutan hasil-hasil penelitian yang meliputi profil responden, statistik deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan.

4.1. Data Penelitian

Sebelum data penelitian di kumpulkan dengan menggunakan kuisisioner (instrumen) dalam wilayah penelitian, peneliti telah melakukan Pilot Tes pada 2 (dua) Perguruan tinggi yang berbeda dengan objek Pilot Tes adalah Mahasiswa Magister Manajemen (MM) UNDIP, Mahasiswa Magister Sains Akuntansi (MAKSI) UNDIP, Mahasiswa Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIP, Mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (MSIEP) UGM, serta DPR Provinsi Jawa Tengah. Setelah melakukan Pilot Tes, peneliti merevisi kuisior berdasarkan uji reabilitas dan validitas dan setiap item pertanyaan yang tidak signifikan, tidak dikeluarkan tetapi direvisi dengan memperhitungkan saran-saran dari para responden Pilot Tes.

1. Demografi Responden

Data demografi berikut menyajikan informasi mengenai Jumlah Anggota dewan, wilayah responden, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD, komisi, jabatan di DPRD, fraksi.

a. Partisipasi Responden per wilayah

Jumlah anggota dewan perkabupaten dapat dijabarkan sebagai berikut; Kabupaten sorong berjumlah 20 orang, Kota Sorong berjumlah 30 orang ,

kabupaten Manokwari berjumlah 25 orang, kabupaten Biak berjumlah 20 orang, kabupaten Yapen Waropen berjumlah 20 orang, kabupaten Nabire berjumlah 20 orang, kabupaten Merauke berjumlah 20 orang, kabupaten Fak-fak berjumlah 20 orang, kabupaten Mimika berjumlah 20 orang, kabupaten Jayawijaya berjumlah 20 orang, kabupaten Jaya Pura berjumlah 25 orang dan kota Jaya Pura berjumlah 30 orang. Jadi jumlah keseluruhan anggota DPRD kabupaten se-Papua adalah sebanyak 275 orang. Pada tabel 4.1.1 Dibawah ini disajikan ringkasan jumlah anggota DPRD Kabupaten Se-Papua.

Tabel 4.1.1. Anggota DPRD Kabupaten Se-Papua.

No	DPRD	Σ Anggota/ Orang
1	Kabupaten Sorong	25
2	Kota Sorong	30
3	Kabupaten Manokwari	25
4	Kabupaten Biak	20
5	Kabupaten Yapen Waropen	20
6	Kabupaten Nabire	20
7	Kabupaten Merauke	20
8	Kabupaten Fak-Fak	20
9	Kabupaten Mimika	20
10	Kabupaten Jayawijaya	20
11	Kabupaten Jayapura	25
12	Kota Jaya Pura	30
Total		275

Sumber: Sekretariat DPRD Per Wilayah. 2005

Jumlah masing-masing anggota dewan perkabupaten pada awalnya tidak diketahui secara pasti sehingga diperkirakan berjumlah 30 orang, maka jumlah populasi dalam penelitian adalah sebanyak 360. *Error sampling* peneliti adalah sebesar 10%, maka diperoleh sample penelitian sebanyak 78 responden. Dengan jumlah sample sebanyak 78, serta *respond rate* (rr) peneliti sebesar 25% maka kuisisioner yang didistribusikan adalah sebanyak 313. Dasar

perhitungan besarnya sampel digunakan rumus Solvin (1960), yang dikutip dalam Husain Umar (2003). Pada tabel 4.1.2 disajikan ringkasan perhitungan Populasi, sampel dan *respond rate* (rr) penelitian.

Tabel 4.1.2. Ringkasan perhitungan Populasi, sampel dan *respond rate* (rr) penelitian.

No	Keterangan	Hasil
1	DPRD	12 ^a
2	Anggota DPRD	30 ^b
3	N (populasi)	360 (a x b)
4	e^2 error sampling	10%
5	n (sample) = $N/1+ e^2$	78 ^c
6	% Respon rate (rr)	25 ^d
7	Kuisisioner yg Dibagikan	313 (c /d x 100)%

Sumber: Data Primer diolah. 2005

Jumlah kuisisioner yang didistribusikan kepada responden anggota Dewan adalah sebanyak 313 kuisisioner dan dari jumlah kuisisioner yang didistribusikan tersebut, terdapat 153 kuisisioner yang tidak dikembalikan, dan dari 160 kuisisioner yang kembali dan terdapat 16 kuisisioner yang pengisiannya tidak lengkap, 50 kuisisioner rusak serta 14 kuisisioner yang dikembalikan melewati batas waktu, sehingga hanya 80 kuisisioner yang dapat diolah. *Respon rate* pengembalian kuisisioner sebesar 51% . Pada tabel 3 terangkum Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuisisioner .

Tabel 4.1. 3 .Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuisisioner

No	Keterangan	Σ Kuisisioner
1	Kuisisioner yang didistribusikan	313
2	Kuisisioner tidak dikembalikan	153

3	Kuesioner yang kembali	160
4	Kuesioner yang tidak lengkap	16
5	Kuesioner yang Rusak	50
6	Kuisisioner yang di kembalikan lebih dari batas waktu	14
7	Kuesioner yang diolah	80
8	<i>Respon rate (Prosentase)</i>	51%

Sumber: Data Primer di Olah, 2005

b. Responden Berdasarkan Wilayah

Responden dari daerah Kabupaten Sorong yang turut berpartisipasi berjumlah 18 responden (23%), dari Kabupaten Manokwari 25 responden (31%), dan Kabupaten Biak 13 responden (26%), Kabupaten Serui 6 responden (8%) , Kabupaten Jayapura 1 responden (1%), Kota Jaya Pura 17 responden (21%). Jadi responden yang paling banyak berpartisipasi adalah dari Kabupaten Manokwari sebanyak 25 responden. Pada tabel 4.1.4 disajikan data mengenai wilayah responden.

Tabel 4.1.4. Wilayah Responden.

No	Keterangan		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Wilayah	Kab.Sorong	18	23
		Kab.Manokwari	25	31
		Kab.Biak	13	16
		Kab.Serui	6	8
		Kab.Jayapura	1	1
		Kota Jayapura	17	21
			80	100

Sumber : Data Primer di Olah .2005

c. Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.

Usia responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan pengelompokan sebagai berikut; responden yang berusia antara 20 tahun

sampai dengan 26 tahun berjumlah 3 responden (4%), yang berusia antara 27 tahun sampai dengan 32 tahun berjumlah 12 responden (15%), yang berusia antara 33 tahun sampai dengan 39 tahun berjumlah 16 responden (20%), yang berusia antara 40 tahun sampai dengan 46 tahun berjumlah 20 responden (25%), yang berusia antara 40 tahun sampai dengan 46 tahun berjumlah 20 responden (25%), yang berusia antara 47 tahun sampai dengan 53 tahun berjumlah 12 responden (25%), yang berusia antara 54 tahun sampai dengan 61 tahun berjumlah 14 responden (18%), yang berusia antara 62 tahun sampai dengan 68 tahun berjumlah 3 responden (4%), jadi usia responden yang paling banyak adalah berusia antara 40 tahun sampai dengan 46 tahun sebanyak 20 responden, sedangkan jumlah partisipasi responden pria adalah sebanyak 73 (91%) dan responden wanita adalah sebanyak 7 (9%) Pada tabel 4.1.5 disajikan data mengenai responden berdasarkan usia dan jenis kelamin.

Tabel 4.1. 5. Usia dan Jenis kelamin Responden.

No	Keterangan		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	73	91
		Perempuan	7	9
2	Usia	20-26 Tahun	3	4
		27-32 Tahun	12	15
		33-39 Tahun	16	20
		40-46 Tahun	20	25
		47-53 Tahun	12	15
		54-61 Tahun	14	18
		62-68 Tahun	3	4

Sumber : Data Primer di Olah .2005

d.Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Jenjang pendidikan responden yang berpartisipasi dalam penelitian sebagai berikut. Responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Lanjutan

Atas (SLTA) berjumlah 37 responden (46,3%), responden yang berpendidikan Diploma Tiga (D3) berjumlah 11 responden (13,8%), responden yang berpendidikan Diploma Empat (D4) berjumlah 1 responden (1,3%), responden yang berpendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 27 responden (33,8%), responden yang berpendidikan Pascasarjana (S2) berjumlah 4 responden (5 %). Jadi pendidikan responden yang paling banyak adalah Sekolah Menengah Lanjutan Atas sebanyak 37 responden. Pada tabel 4.2.1. disajikan data Jenjang Pendidikan responden.

Tabel 4.2.1. Jenjang Pendidikan Responden.

No	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SLTA	37	46,3
	D3	11	13,8
	D4	1	1,3
	S1	27	33,8
	S2	4	5,0

Sumber : Data Primer di Olah .2005

e. Responden Pekerjaan Sebelum menjadi Anggota Dewan.

Gambaran responden dari sisi pekerjaan sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat penulis gambarkan sebagai berikut; Responden yang menjawab sebagai wiraswasta berjumlah 18 responden (23%), sebagai karyawan swasta berjumlah 46 responden (58%), sebagai TNI POLRI berjumlah 2 responden (3%), dan sebagai PNS berjumlah 14 responden (18 %) . Jadi pekerjaan responden sebelum menjadi anggota DPRD yang paling banyak adalah Karyawan Swasta sebanyak 46 responden. Pada tabel 4.2.2. disajikan data mengenai pekerjaan responden sebelum menjadi anggota Dewan.

Tabel 4.2.2. Pekerjaan Responden.

No	Keterangan		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Pekerjaan Terakhir	Wiraswasta	18	23
		SWASTA	46	58
		TNI/POLRI	2	3
		PNS	14	18

Sumber : Data Primer di Olah. 2005

f. Responden Berdasarkan Jabatan Dewan dan Komisi-komisi.

Gambaran responden dari sisi jabatan yang diemban saat ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut; responden yang mengemban jabatan Ketua DPRD berjumlah 3 Responden (4%) dan Jabatan Wakil Ketua berjumlah 4 responden (5 %), ditinjau dari jabatan pada komisi-komisi adalah sebagai berikut: Pada Komisi A berjumlah 21 responden (26%), Komisi B berjumlah 18 responden (23%), Komisi C berjumlah 22 responden (28%), Komisi D berjumlah 12 responden (15%). Jadi tingkat partisipasi responden pada keempat komisi yang paling banyak adalah adalah pada komisi C sebanyak 22 responden. Pada tabel 4.2.3. disajikan data mengenai jabatan responden dan Komisi-komisi di DPRD.

Tabel 4.2.3. Jabatan Responden dan Komisi-komisi.

No	Keterangan		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Jabatan di DPR	Ketua	3	4
		Wakil Ketua	4	5

2	Komisi	A	21	26
		B	18	23
		C	22	28
		D	12	15

Sumber : Data Primer di Olah .2005

g .Responden Keanggotaan Fraksi dan Lama menjabat.

Adapun jumlah Fraksi-fraksi yang terdata, diperoleh gambaran sebagai berikut: Responden dari Fraksi Golkar berjumlah 15 responden (19%), dari Fraksi Gabungan berjumlah 10 responden (13%), dari Fraksi Demokrasi Kebangsaan berjumlah 6 responden (8%), dari Fraksi Gabungan Pembaharuan berjumlah 4 responden (5%), dari Fraksi Pembaharuan berjumlah 10 responden (13%), dari Fraksi Kebangsaan berjumlah 5 responden (6%), dan dari Fraksi Golkar Bersatu berjumlah 22 responden (13%), Jadi fraksi yang paling banyak berpartisipasi adalah Fraksi Golkar Bersatu sebanyak 22 responden. Dilihat dari periode menjabat sebagai anggota DPRD, sejumlah 70 responden (88%) menjawab baru satu periode, dan sejumlah 10 responden (13%) menjawab lebih satu periode. Pada tabel 4.2.4. berikut disajikan data mengenai keanggotaan fraksi dan Lamanya menjabat.

Tabel 4.2.4 . Keanggotaan Fraksi dan Lama menjabat.

No	Keterangan		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Fraksi	Golkar	15	19
		Gabungan	10	13
		Demokrasi Kebangsaan	6	8
		Demo.Sejahtera	8	10
		Gabungan Pembaharu	4	5
		Pembaharuan	10	13
		Kebangsaan	5	6
		Golkar Bersatu	22	28
2	Lama Menjabat	<1 Periode (2004-2009)	70	88
		>1 Periode(<1999)	10	13

Sumber: Data Primer diolah, 2005

2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 80, tetapi berdasarkan *screening* terhadap normalitas data terdapat 2 responden yang terdeteksi outlier maka telah dikeluarkan, sehingga jumlah responden yang dapat digunakan adalah sebanyak 78. Pada tabel 4.2.5. disajikan ringkasan

statistik deskriptif berupa gambaran kisaran teoritis, kisaran nyata, rata-rata dan standar deviasi yang terjadi.

Tabel 4.2.5. Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan, Partisipasi, Transparansi dan Pengawasan.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGETAH	78	20	28	24,6	2,0
PARTISIP	78	26	45	33,8	4,5
TRANSPAR	78	25	40	33,7	3,0
PENGAWAS	78	66	94	77,1	5,9
Valid N (listwise)	78				

Sumber : Data Primer diolah, 2005

3. Uji Reabilitas

Untuk menguji reabilitas suatu konstruk, diuji dengan uji statistik *cronbach alpha (a)*. (Ghozali 2002, p132). Suatu konstruk dikatakan *realible* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.60 (Nunally,1967). Pada tabel 4.3.1. disajikan ringkasan hasil uji reabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian setelah skor butir pertanyaan yang tidak signifikan dikeluarkan dari model.

Tabel 4.3.1. Hasil Uji Reabilitas.

No	Variabel	Cronbach Alpha
1	Pengetahuan Anggaran	0,63
2	Partisipasi Masyarakat	0,57
3	Transparansi KP	0,72
4	Pengawasan APBD	0,64

Sumber: Data Primer diolah, 2005

Berdasarkan hasil uji reabilitas diatas terlihat bahwa cronbach alpha untuk masing-masing konstruk < 0,60 yang menurut kriteria Nunali (1967) bisa dikatakan realibel, hanya pada konstruk Partisipasi Masyarakat yang cronbach alphanya < 60 (0,58) tetapi berdasarkan uji *Confirmatory Faktor Analisis (CFA)* dengan melihat Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of *Sampling Adequacy (KMO MSA)* = 0,78 dan 6 indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk pengetahuan telah terbentuk kedalam 2 faktor berdasarkan nilai *eigenvalues* >1, dimana faktor 1 dengan *eigenvalues*= 3,05 dan faktor 2 dengan *eigenvalues*= 1,14 dan nilai loading faktor 1=50,77% , loading faktor 2 = 69,78%, atau kedua faktor mampu menjelaskan variasi sebesar 69,78%, maka menurut peneliti variabel partisipasi masyarakat layak digunakan dalam penelitian ini.

4.Uji Validitas.

a.Validitas Konstruk Pengetahuan

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Pada tabel 4.3.2. disajikan ringkasan hasil uji validitas konstruk Pengetahuan.

Tabel 4.3.2. Uji Validitas.

No	Variabel	Person correlation	Significant	Status
1	PENGETA	395** -718**	0,000-0,000	Valid
2	PARTISIP	256 * -374**	0,001-0,046	Valid
3	TRANSPAR	321** -726**	0,001-0,004	Valid
4	PENGAWAS	352** -585**	0,001-0,002	Valid
* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)				
**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)				

Sumber: Data Primer di olah .2005

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk variabel PENGETAH, PARTISIP, TRANSPAR, dan PENGAWAS nilai signifikan pada level 0,01-005. maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid.

b. Uji Confirmatory Faktor Analysis (CFA)

Untuk mengetahui bahwa suatu indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk maka peneliti menggunakan *Confirmatory Faktor Analisis (CFA)*, dengan melihat Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of *Sampling Adequacy* (KMO MSA) dan *Bartlett's test of Sphericity* (BTS). Nilai KMO yang dikehendaki harus lebih dari 0,50.(Ghazali 2005, p 49). Pada tabel 4.3.3. disajikan ringkasan hasil uji *Confirmatory Faktor Analisis (CFA)*.

Tabel 4.3.3. Hasil Uji Confirmatory Faktor Analisis (CFA).

Variable	KMO & BARLET TES			Total Variance Explained		ROTATE COMPONENT MATRIX
	KMO	BTS chi-square	Sig.	Compo Nent	Eiginvalues /Loading %	Total Compo Nent
PENGETAH	0,505	35,579	0,000	5	58,86	2
PARTISIP	0,785	151,889	0,000	6	69,78	2
TRANSPAR	0,708	157,767	0,000	8	69,0	3
PENGAWAS	0,584	222,635	0,000	10	71,15	4

Sumber: Data Primer diolah.2005

Berdasarkan hasil uji CFA diatas, Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of *Sampling Adequacy* (KMO MSA) untuk masing-masing variabel >0,50 memenuhi asumsi analisis faktor (Ghazali 2005, p 49) dan realibel serta nilai *Bartlett's test of Sphericity* (BTS) dengan *chi-square* signifikan maka dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan. Setelah dilakukan analisis faktor untuk masing-masing varibel, dari 5 indikator variabel PENGETAH,

terbentuk dalam 2 faktor berdasarkan eigenvalue >1 dengan nilai loading faktor = 58,86%, yang artinya ke dua faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PENGETAH dengan variasi sebesar 58,86 % yang didalamnya berisikan indikator dari 1-5. Untuk variabel PARTISIP, terdapat 6 indikator yang terbentuk dalam 2 faktor berdasarkan eigenvalue >1 dengan nilai loading faktor = 68,78%, yang artinya ke dua faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PARTISIP dengan variasi sebesar 68,78 % yang didalamnya berisikan indikator dari 1-6, sementara variabel TRANSPAR, terdapat 8 indikator terbentuk dalam 3 faktor berdasarkan eigenvalue >1 dengan nilai loading faktor = 68%, yang artinya ke tiga faktor tersebut mampu menjelaskan variabel TRANSPAR dengan variasi sebesar 68% yang didalamnya berisikan indikator dari 1-6 dan Untuk variabel PENGAWAS, terdapat 10 indikator yang terbentuk dalam 4 faktor berdasarkan eigenvalue >1 dengan nilai loading faktor = 71,15%, yang artinya ke empat faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PENGAWAS dengan variasi sebesar 68,78 % yang didalamnya berisikan indikator dari 1-10. Berdasarkan hasil rotasi komponen matriks pada lampiran analisis faktor, menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki undimensionalitas atau dengan kata lain semua indikator yang digunakan memiliki faktor penjelas yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing skor butir pertanyaan adalah valid.

5. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik pada bagian ini meliputi pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dan normalitas.

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Untuk mendekteksi adanya multikolinieritas, peneliti menggunakan nilai *cut of* dengan nilai *tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai VIF >10 (Ghozali, 2005). Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dari ketiga variabel independen yang diuji, tidak terdapat korelasi antar variabel yang melebihi batas 90%, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas yang serius. Hasil perhitungan nilai *tolerance* terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* < 0,10, yang artinya tidak ada korelasi antara variabel independent yang lebih dari 95%, demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, dari ketiga variabel independen yang diuji tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independent dalam model regresi. Pada tabel 4.3.4. berikut disajikan ringkasan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 4.3.4. Hasil Uji Multikolinieritas.

Model		TRANSPAR	PENGETAH	PARTISIP	Collinearity Statistics		
					Tolerance	VIF	
1	Correlations	TRANSPAR	1,000	-0,072	-0,380	0,903	1,107
		PENGETAH	-0,072	1,000	-0,253	0,777	1,287
		PARTISIP	-0,380	-0,253	1,000	0,826	1,211
	Covariances	TRANSPAR	0,008	-0,001	-0,002		
		PENGETAH	-0,001	0,016	-0,002		
		PARTISIP	-0,002	-0,002	0,004		

Sumber : Data Primer Diolah, 2005

b. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2005). Autokorelasi diuji dengan menggunakan Durbin-Watson (DW). Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson nilai DW untuk ketiga variabel independent adalah 1,745 yang kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan $\alpha=5\%$, jumlah Sampel (n) sebanyak 78 serta jumlah variabel independen (k) = 3, maka diperoleh nilai dl = 1,543 dan du = 1,709 dan DW= 1,745. Oleh karena nilai DW 1,745 lebih besar dari batas atas (du) 1,709 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian ini. Pada tabel 4.3.5. berikut disajikan ringkasan hasil uji Durbin Watson.

Tabel 4.3.5. Hasil Uji Durbin Watson.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	dl	du
1	0,933	0,871	0,865	2,14536	1,745	1,543	1,709
n = 78						k = 3	

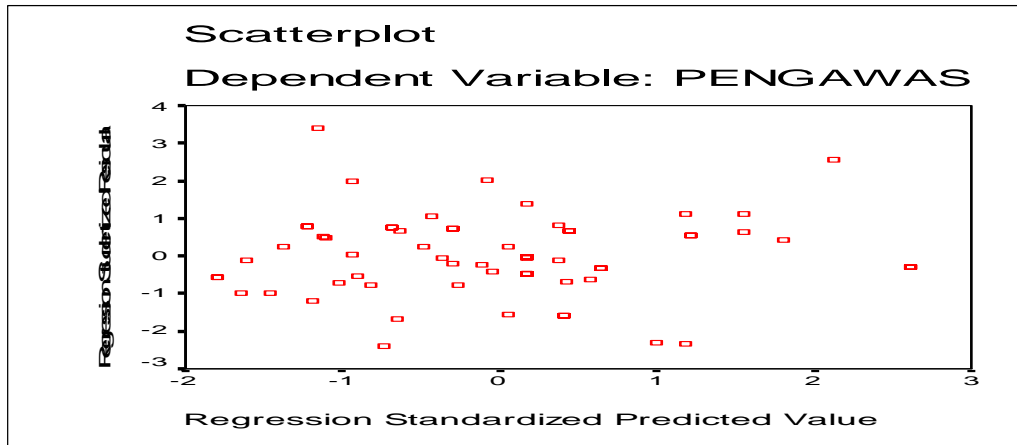
Sumber: Data Primer diolah, 2005.

c. Hasil Uji Heteroskedastitas

Pengujian model regresi penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), dengan dasar analisis, jika ada pola tertentu, seperti menyempit yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastitas, dan jika ada pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka

tidak terjadi Heteroskedastitas (Ghozali, 2005). Pada gambar 5 disajikan grafik *scartter plots*

Gambar 4.1. Grafik *scartterplots*.



Sumber : Data Primer diolah. 2005

Berdasarkan grafik *scartterplots* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel pengawasan keuangan daerah berdasarkan masukan dari variabel independen pengetahuan, partisipasi dan transparansi.

d. Hasil Uji Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel independen dan dependen keduanya terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali,2002). Dalam pengujian ini peneliti menggunakan analisis statistic *one-Sampel Kolmogorov-Sminorv test* dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji K-S menunjukkan bahwa besarnya nilai *K-S* adalah 0,907 dan signifikan

pada 0,383, maka hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Pada tabel 4.4.1. Berikut disajikan ringkasan hasil uji Normalitas Data.

Tabel 4.4.1. Hasil Uji Normalitas Data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		-,0033592
	Std. Deviation		2,13127875
Most Extreme Differences	Absolute		,103
	Positive		,103
	Negative		-,079
Kolmogorov-Smirnov Z			,907
Asymp. Sig. (2-tailed)			,383

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer diolah, 2005.

4.2. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengetahuan Dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Model statistik penelitian untuk mengetahui hasil pengujian dalam penelitian ini menggunakan model statistik regresi berganda (*multiple regresi*). Hal ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun bersama-sama (simultan). Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 11.05.

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti α yang digunakan

sebesar 0,05. Hal ini berarti menunjukkan bahwa, jika nilai p atau p value < 0,05 berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Disamping p value peneliti juga menggunakan uji t, uji F, koefisien determinasi dan nilai R square.

1. Pengujian hipotesis I

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menguji pengaruh langsung pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut :

Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pada tabel 4.4.2. disajikan ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis pertama.

Tabel 4.4.2. Hasil Regresi Hipotesis Pertama

No	Keterangan	n	Adj R ²	F value	Sig	Nilai Koefisien	t-value	p-value
1	Sampel Dewan	78	0,05	5,813	0,01			
	Kostanta					58,132	7,353	0,000
	Pengetahuan Dewan					0,772	2,411	0,018
F(tabel) = 3,98						t (tabel) = 1,992		

Sumber : Data Primer diolah, 2005

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis 1 pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,018, serta hubungan koefisien regresinya adalah 0,772. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,411 dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,992) dan nilai dari F hitung sebesar 5,813 (>f tabel 1,583) dengan tingkat signifikan 0,01 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut :

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Pada tabel 4.4.3. disajikan hasil regresi dari hipotesis kedua.

Tabel 4.4.3. Hasil Regresi Hipotesis Kedua.

Keterangan	N	Adj R ²	F	Sig	Nilai Koefisien	t-Value	p-Value
Sampel Dewan	78	85%	85,854	0,00			
Kostanta					-7,301	-0,219	0,828
Pengetahuan					2,476	1,340	0,184
Partisipasi					2,436	2,852	0,006
Interaksi Pengetahuan & Partisipasi					-8,072	-2,125	0,037
F (tabel) = 2,74				t (tabel) = 1,991			

Sumber : Data Primer diolah, 2005.

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke dua, pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 274 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung hasil regresi adalah -2,125 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,037 serta hubungan koefisien regresinya adalah -0,072.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa 86 % variasi variabel pengawasan APBD yang dilakukan dewan dapat dijelaskan variabel pengetahuan, partisipasi, transparansi dan interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan sisanya 14 % disebabkan faktor lain diluar model.

3. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut:

Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Pada tabel 4.4.4. disajikan ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis 3.

Tabel 4.4.4. Hasil Regresi Hipotesis Ketiga.

Keterangan	n	Adj R ²	F	Sig	Nilai Koefisien	t-value	p-value
Sampel Dewan	78	86%	85,854	0,00			
kostanta					-7,301	-0,219	0,828
Pengetahuan					2,474	1,340	0,184
Transparansi					0,150	0,117	0,908
Interaksi Pengetahuan & Transparansi					-2,430	-0,365	0,716
F (tabel) = 2,74					t (tabel) = 1,991		

Sumber : Data Primer diolah, 2005

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2,74 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah -0,365 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,716, serta hubungan koefisien regresi adalah -2,430.

4. Pengujian Hipotesis 4

Pengujian hipotesis 4 dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).

Pada tabel 4.4.5. disajikan ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis 4.

Tabel 4.4.5. Regresi Hipotesis Keempat.

Keterangan	n	Adj R ²	F	Sig	Nilai Koefisien	t-value	p-value
Sampel Dewan	78	86%	85,854	0,00			
Kostanta					8,370	-0,219	0,828
Pengetahuan					2,474	1,340	0,184
Interaksi Pengetahuan, Partisipasi & Transparansi					0,888	1,222	0,226
F(tabel) = 2,74				t (tabel) = 1,991			

Sumber : Data Primer diolah, 2005

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 274 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 1,222 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,226, serta hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 8,370.

4.3. Pembahasan.

1. Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,018 ($<\alpha$ 0,05). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif sebesar 0,772 tetapi *P-valuenya* jauh diatas $<\alpha$ 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan pada saat penyusunan, deteksi terhadap kebocoran dan pemborosan serta identifikasi terhadap kebocoran dan pemborosan APBD.

Nilai *t* hitung dari hasil regresi adalah 2,411 dimana *t* hitung ini lebih besar dari *t* tabel (1,991), maka hipotesis pertama diterima. Dilihat dari *F* hitung sebesar 5,813 dengan tingkat signfikan 0,01 jauh dibawah 0,05 dan koefisien regresinya positif dengan nilai = 0,772 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah, atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Andriani (2002), Sutarnoto, 2002 , Indradi, 2001 dan Syamsiar, 2001;2002;). Dilihat dari koefisien Determinasinya = 0,05, hal ini berarti 50 % variasi pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran dan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan sebesar 50% dan sisanya 50% disebabkan faktor lain diluar model.

Apabila merujuk pada Indriantono dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian pendidikan dan pengalaman memberikan dukungan kepada Dewan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan atau fungsi *checks and balance*. Dengan semakin tinggi pendidikan dan pengalamannya diharapkan Dewan semakin tahu akan tugas dan tanggungjawabnya sehingga akan senantiasa meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai lembaga representatif masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa kualitas anggota Dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja Dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan anggaran (APBD). Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor Politis juga sangat besar pengaruhnya dalam melakukan pengawas anggaran (APBD), diantaranya isu disintegrasi bangsa serta kepentingan kedudukan dan jabatan serta kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Disamping itu, pengawasan dewan juga bisa dipengaruhi oleh mereka yang punya kepentingan bisnis yang

menginvestasikan kekayaan untuk meraih keuntungan kapital sebut saja kepentingan para stakholder lainnya. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat banyak yang terabaikan.

2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 74 dengan tingkat signifikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah -2,125 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,037. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi dengan tanda (*sign*) adalah -8,072 meskipun nilai *P valuenya* signifikan sebesar 0,037 namun hasil tersebut berlawanan dengan hipotesis dua yang menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua. Hal menunjukan bahwa walaupun ketika dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat, namun stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Temuan ini tidak konsisten

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003) yang tidak dapat menyimpulkan hasil uji hipotesis ke dua, ketidakkonsistenan dengan hasil penelitian terdahulu disebabkan karena perbedaan hasil uji sampel. Peneliti terdahulu melakukan uji interaksi dengan menggunakan persepsi dewan dan persepsi masyarakat sementara penelitian ini hanya menguji interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan persepsi dewan tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal Baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan.

Teori diatas, cukup relevan untuk menjelaskan bahwa dewan dalam proses pembentukan persepsi terdapat proses seleksi, dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian, dan proses penginterpretasian atas *stimuli* yang diterima. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran merupakan objek pembentuk persepsi dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu fungsi pengawan. Harapannya adalah ketika terjadi reformasi anggaran pada

sektor publik dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, maka diharapkan Dewan dapat menginterpretasikan *stimuli* yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998).

3. Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2,74 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah -0,365 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya (*P-Value*) sebesar 0,716. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar -2,340 dan *P-valuenya* jauh diatas $<\alpha$ 0,05 maka penelitian ini menolak hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, tidak diterima. Hal menunjukkan bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan publik, stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003). Peneliti sependapat dengan peneliti terdahulu bahwa "Transparansi kebijakan publik masih dalam tahap wacana " dan "implementasinya masih dalam tahap formalitas" sementara akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Hal ini juga dibuktikan dengan demonstrasi yang sering dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa di Papua, baik yang berada di Papua maupun luar Papua yang menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dari kebijakan publik itu sendiri.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Persepsi yang dikemukakan oleh Robbins (1987) menyatakan bahwa Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan serta tidak terlepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyarankan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu, didasarkan darimana perilaku itu timbul, secara internal atau eksternal. Tetapi penentuan ini tergantung pada kekhususan (*distinctiveness*), konsesus dan konsistensi. Perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu bersumber pada internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku itu oleh situasi.

Kekhususan merujuk kepada apakah seseorang individu memperagakan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Jika perilakunya luar biasa, kemungkinan besar pengamat itu memberikan atribusi eksternal kepada perilaku itu. Jika tindakan ini tidak luar biasa, agaknya itu akan dinilai sebagai bersifat eksternal. Konsensus ditunjukkan dengan respons yang serupa dalam situasi yang sama. Sedangkan konsistensi dalam perilaku ditunjukkan apakah seseorang akan memberi respons dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Tetapi terdapat penemuan yang cukup menarik dari teori atribusi bahwa terdapat kekeliruan atau prasangka yang menyimpangkan atau memutar balik atribusi. Misalnya seperti dalam melihat suatu kesuksesan, seseorang cenderung untuk mengabaikan faktor eksternal, dan lebih mengutamakan faktor internal, sebaliknya untuk kegagalan seringkali faktor eksternal yang dipersalahkan.

Teori diatas, cukup relevan untuk menjelaskan bahwa dewan dalam proses pembentukan persepsi terdapat proses seleksi, dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian, dan proses penginterpretasian atas *stimuli* yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998).

4. Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke empat dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 74 dengan

tingkat signifikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 1,222 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,266. Hubungan ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 8,260 artinya walaupun semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran tetapi respon para anggota dewan tentang sebuah “objek pemersepsi” yang dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang menjadi tuntutan *good corporate governanance* tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga akan berdampak pada penyalahgunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif tetapi *P valuenya* tidak signifikan ($0,266 > \alpha 0,005$) sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD) tidak diterima. Temuan ini konsisten teori yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998) seperti yang telah dijelaskan diatas.

BAB V

PENUTUP

Pada Bab ini akan disajikan simpulan atas hasil penelitian, keterbatasan, implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan dalam bab IV maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini:

1. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.018 ($< \alpha$ 0,05) atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat.
2. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,03 dengan koefisien regresinya bernilai negatif (-2,403), Hal menunjukkan bahwa walaupun ketika dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat, namun stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,716 ($>\alpha$ 0,05) dan koefisien regresi sebesar -2,430. Hal menunjukkan bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan publik, stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah.

4. Berdasarkan Hasil uji hipotesis ke empat dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,266 dan koefisien regresi sebesar 8,260 artinya walaupun semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran tetapi respon para anggota dewan tentang sebuah “objek pemersepsi” yang dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang menjadi tuntutan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga akan berdampak pada penyalahgunaan anggaran.

5.2. Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini. Keterbatasan tersebut adalah :

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD se-Papua, dengan mengambil seluruh komisi (Komisi A, B, C dan D), dengan tidak membedakan tugas dan fungsi dari setiap komisi yang

membidangi masalah anggaran.

2. Luasnya wilayah penelitian merupakan suatu hambatan bagi peneliti, secara khusus pada saat pengiriman dan pengembalian kuisioner yang telah dijawab oleh para responden sehingga berdampak *respon rate*
3. Masa jabatan oleh para responden yang baru menjabat sebagai anggota dewan lebih banyak (88% atau 70 responden) dari yang sudah menjabat lebih dari 1 periode (13% atau 10 responden), sehingga mempengaruhi hasil penelitian.
4. Instrumen pengambilan data berbentuk kuisioner dikembangkan dari peneliti terdahulu dan berdasarkan *pilot test*, namun konstruk penelitian yang diturunkan dalam bentuk pertanyaan-pernyataan setelah *pilot test* kurang banyak dan kurang variatif, hal ini dibuktikan dengan dari 58 skor butir pertanyaan yang digunakan hanya 29 skor butir pertanyaan yang signifikan.
5. Variabel Independen dan Model Regresi yang digunakan

5.3. Saran dan Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka terdapat beberapa saran dan implikasi sebagai berikut :

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian mendatang pada saat pengambilan sampel hendaknya memilih sampel anggota dewan yang membidangi anggaran.
- b. Pada saat pengambilan sampel hendaknya menggunakan teknik pemilihan sampel area (*Area Sampling*) untuk populasi yang letak geografisnya luas dan terpencar.

- c. Untuk melihat perbedaan jawaban antara responden yang menjabat kurang dari 1 periode dan lebih dari 1 periode, diharapkan dapat mengontrol variabel pengetahuan dengan menggunakan uji beda (*t-test*).
- d. Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan *pilot tes* kuisioner yang dilakukan belum menjamin bahwa semua pertanyaan yang disusun memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sehingga, instrumen penelitian ini perlu dilakukan *pilot tes* secara berulang.
- c. Serta penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan Uji residual untuk menghindari multikolinieritas yang tinggi antara variabel dependen dan independen, karna uji residual memungkinkan untuk menggambarkan ke dua variabel moderasi.

2. Bagi Kebijakan

- a. Bagi anggota Dewan, untuk meningkatkan kinerjanya, diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dalam pengambilan keputusan tidak salah. Pengetahuan sangat terkait dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Untuk mendukung aktivitas Dewan, DPRD dapat menggunakan tim ahli dalam memecahkan persoalan yang mungkin tidak dapat dipecahkan oleh anggota Dewan.
- b. Sementara, bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan meningkatkan transparansi kebijakan publik khususnya kebijakan tentang anggaran sehingga akan meningkatkan tingkat pengawasan anggaran
- c. (APBD) yang dilakukan oleh Dewan. pat mengkaderkan anggota dengan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan kualitas SDM walaupun jabatan sebagai anggota Dewan adalah jabatan politis. Dengan meningkatnya kualitas SDM diharapkan akan meningkatkan kinerja Dewan, baik dalam pengawasan maupun kinerja dalam bidang tugasnya.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam bidang penganggaran dan sistem pengendalian manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta.
- Andrianto Rinto, 2002, *Memahami Anggaran Publik*, Cetakan Pertama, Idea Press, Jogjakarta.
- Alamsyah, 1997, *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis MAP UGM , Jogjakarta.
- Bazwir, Revrison, 1999, *Akutansi Pemerintah Indonesia*, Edisi tiga BPFE Jogjakarta.
- Bastian 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama BPFE Jogjakarta.
- Cooper, D.R. & C.W.Emory, 1995, *Bussines Research Methods*. 5th Edition, USA, Irwin.
- Dobell, Peter dan Ulrich, 2003. Parliament's performance in the budget process: A case study. *Policy Matter*: <http://www.irpp.org>.
- Fatchurrochman, 2002, *Manajemen Keuangan Publik*, Materi Pelatihan Anti Korupsi, *Indonesian Coroption Watch*.
- Ghozali.Imam, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim. (2004) *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Ichsan, M, Ratih dan Trilaksono, N, 1997, *Administrasi keuangan Daerah: Pengelolaan dan penyusunan APD*, Malang, Brawijaya University Pers.
- Indradi, Syamsiar, 2001, *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Indriantoro dan Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi*

dan Manajemen, BPF., Jogjakarta.

Kaiser, H. dan Rice, J., 1974, *Educational and Psychological Measurement*, Volume 34, No .1, Page 111-117.

Kurniawan, J.Luthfi, 2003, *Diskusi Anggaran Publik*, 2 Agustus 2003, Malang Corruption Watch, Malang.

Kumpulan Peraturan Sebagai Pedoman Tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota 2004-2009, Pustaka Info Data Indonesia, Jakarta.

Loina Lalolo Krina P. Agustus 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

LeLoup, Lance T. 1986. *Budgetary Politics*. Third edition. Brunswick, Ohio: King's Court Communications, Inc, dalam Halim. (2004), *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*, Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*, Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.

Nunnaly, 1967, *Psychometric Theory*, McGraw-Hill, New York.

Pramono, Agus H., 2002, *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.

Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung.

Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung.

- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Pustaka Pergaulan, Jakarta .
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* , Pustaka Pergaulan Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara*, Cipta Jaya Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara*, Tamita Utama Jakarta.
- _____ , 2001, *Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*, Citra Umbara, Bandung.
- _____ , 2001, *Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1999 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*, Citra Umbara, Bandung.
- _____ , 2001, *Departemen Dalam Negeri, Konsep dan Paduan Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Jakarta*.
- Rubin, Irene, 1996, Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, *Journal Public Budgeting & Finance*, Summer, pp. 112-132.
- Rubin, Irene S. (Ed.). 1988. *New Directions in Budget Theory*. New York, NY: State University of New York Press, dalam Halim.A. (2004), *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*. Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sjamsudin, Syamsiar, 2001, *Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang*, Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial, Vol.13, No.2, Malang.
- Sutarnoto, Tejo, 2002, *Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Sopannah, 2003, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*.(Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta) SNA VI Surabaya, oktober 2003, p1160.
- Truman, David B, 1960, *The Governmental Process, Political Interest and Public Opinion*, Alfred A Knof, New York , pp 333, dalam Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam*

Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta).

Wolk, Tearney dan Dodd (2000), *Accounting Theory*, fifth Edition, South Western College Publishing.

Wildaysky, Aaron. 1975. *Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Process*. Boston: Little, Brown and Company.

Yudono, Bambang, 2002, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm>.

Permohonan Menjadi Responden

Kepada Yth: Bpk/Ibu/Sdr.

Di Tempat,

Dengan Hormat,

Saya adalah Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua yang saat ini sedang menyelesaikan tesis di Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Saya sangat mengharapkan partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden dalam penelitian yang berjudul *"Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah."*

Jawaban atas daftar pertanyaan dalam kuesioner ini, saya jamin kerahasiaannya karena hanya semata-mata untuk keperluan pengembangan disiplin keilmuan dan apapun yang di jawab oleh Bapak/Ibu/Saudara tidak salah. Saya sangat berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Semarang, September 2004

Dosen Pembimbing,

(.....)

Hormat Saya,

(.....)

Identitas Responden (Masyarakat)

Mohon di isi dengan nmemberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan. Serta jawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

1. Nama : (boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

3. Tempat Lahir Umur: , tahun

4. Institusi : LSM Organisasi Politik

Akademisi/PT Organisasi Masyarakat

Mahasiswa Tokoh Masyarakat

Media massa Lain-lain

5. Pekerjaan.....

6. Strata pendidikan

SLTA/Sederajat DI D2 D3 D4

S1 S2 S3 Lainnya

7. Pengalaman di Organisasi Sosial Kemasyarakatan

No	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
1			
2			
3			
4			

Identitas Responden (Dewan)

Mohon di isi dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan dan menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

1. Nama: (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan
3. Tempat Lahir : Umur: tahun
4. Jabatan di DPRD:
 - Ketua DPRD
 - Wakil Ketua
 - Anggota Komisi..... Jabatan di komisi
 - Anggota Fraksi Jabatan di fraksi
5. Berapa Periode Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD.
 - Periode tahuns/d selamatahun di DPRD
 - Periode tahuns/d selamatahun di DPRD
6. Sudah berapa lama **Bapak/Ibu/Sdr.** berdomisili di Kab/Kota Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD. Selama tahun, dari tahun s/d
7. Strata pendidikan:
 - SLTA/Sederajat DI D2 D3 D4 SI S2
 - S3 Lainnya
8. Pekerjaan utama terakhir sebelum menjadi anggota DPRD.....
9. Pengalaman di Organisasi Kemasyarakatan

No	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
1.			

2.			
3.			
4.			

10. Bapak/ ibu/sdr adalah anggota Partai Politik (parpol)
11. Sebelum menjadi anggota Parpol yang sekarang Bapak/Ibu pernah menjadi anggota Partai Politik (Parpol) lain, sebutkan

**PENGARUH PARTISPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan semakin meningkat. Untuk mamenuhi tujuan tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan cara memberi silang (X) sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu/Saudara..

Alternatif jawaban yang tersedia:

- SS : Sangat setuju
S : *Setuju*
TT : Tidak tahu
TS : Tidak setuju

Permohonan Menjadi Responden

Kepada Yth: Bpk/Ibu/Sdr.

Di Tempat,

Dengan Hormat,

Saya adalah Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua yang saat ini sedang menyelesaikan tesis di Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Saya sangat mengharapkan partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden dalam penelitian yang berjudul "*Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah.*"

Jawaban atas daftar pertanyaan dalam kuesioner ini, saya jamin kerahasiaannya karena hanya semata-mata untuk keperluan pengembangan disiplin keilmuan dan apapun yang di jawab oleh Bapak/Ibu/Saudara tidak salah. Saya sangat berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Semarang, September 2004

Dosen Pembimbing,

(.....)

Hormat Saya,

(.....)

Identitas Responden (Masyarakat)

Mohon di isi dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan. Serta jawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

1. Nama : (boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

3. Tempat Lahir Umur: , tahun

4. Institusi : LSM Organisasi Politik

Akademisi/PT Organisasi Masyarakat

Mahasiswa Tokoh Masyarakat

Media massa Lain-lain

5. Pekerjaan.....

6. Strata pendidikan

SLTA/Sederajat DI D2 D3 D4

S1 S2 S3 Lainnya

7. Pengalaman di Organisasi Sosial Kemasyarakatan

No	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
1			
2			
3			
4			

Identitas Responden (Dewan)

Mohon di isi dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan dan menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

5. Nama: (boleh tidak diisi)

6. Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

7. Tempat Lahir : Umur: tahun

8. Jabatan di DPRD:

Ketua DPRD

Wakil Ketua

Anggota Komisi..... Jabatan di komisi

Anggota Fraksi Jabatan di fraksi

5. Berapa Periode Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD.

Periode tahuns/d selamatahun di DPRD

Periode tahuns/d selamatahun di DPRD

12. Sudah berapa lama **Bapak/Ibu/Sdr.** berdomisili di Kab/Kota Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD. Selama tahun, dari tahun s/d

13. Strata pendidikan:

SLTA/Sederajat DI D2 D3 D4 SI S2

S3 Lainnya

14. Pekerjaan utama terakhir sebelum menjadi anggota DPRD.....

15. Pengalaman di Organisasi Kemasyarakatan

No	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
1.			

2.			
3.			
4.			

16. Bapak/ ibu/sdr adalah anggota Partai Politik (parpol)
17. Sebelum menjadi anggota Parpol yang sekarang Bapak/Ibu pernah menjadi anggota Partai Politik (Parpol) lain, sebutkan

**PENGARUH PARTISPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan semakin meningkat. Untuk mamenuhi tujuan tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan cara memberi silang (X) sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu/Saudara..

Alternatif jawaban yang tersedia:

- SS : Sangat setuju
S : *Setuju*
TT : Tidak tahu
TS : Tidak setuju

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X 1)

No	PERTANYAAN				TS	STS
					(2)	(1)
	Proses penyusunan APBD menurut saya sudah memenuhi sistematika yang ditetapkan dalam PERDA	S		T	TS	STS
2.	Hasil Penjaringan aspirasi masyarakat perlu mendapat prioritas dalam penyusunan APBD	S		T	TS	STS
3.	Dalam penyusunan RAPBD menurut saya telah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah	S		T	TS	STS
4.	Apabila terjadi defisit anggaran, menurut saya dapat ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit	S		T	TS	STS
5.	Apabila terjadi surplus anggaran, menurut saya dapat ditetapkan penggunaan surplus dalam APBD	S		T	TS	STS
6.	Kebijakan umum APBD yang diajukan oleh PEMDA yang telah disepakati, menurut saya dijadikan acuan bagi penyusunan APBD	S		T	TS	STS
7.	Penggunaan dana APBD menurut saya telah melebihi kemampuan keuangan daerah	S		T	TS	STS
8.	Menurut saya, dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah, APBD dapat dikelola secara profesional	S		T	TS	STS
9.	Penyimpangan dana APBD teridentifikasi melalui pembiayaan	SS	S	TT	TS	STS
10.	Sebagai anggota dewan, saya mempunyai hak untuk mengusulkan	SS	S	TT	TS	STS

Partisipasi Masyarakat (X 2)

No	PERTANYAAN	SS	S	TT	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
11	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD	SS	S	TT	TS	STS
12	Perubahan atas APBD apabila disampaikan kepada masyarakat akan mengakibatkan proses penyusunan anggaran yang berulang.	SS	S	TT	TS	STS
13	Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD	SS	S	TT	TS	STS
14	saya kira masyarakat kurang berperan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD	SS	S	TT	TS	STS
15	Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD	SS	S	TT	TS	STS

16	Mekanisme Penyerapan aspirasi masyarakat selama ini, menjadi hambatan partisipasi masyarakat dalam advokasi anggaran.	SS	S	TT	TS	STS
17	Sepengetahuan saya masyarakat selama ini dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD	SS	S	TT	TS	STS

	Menurut Saya antara dewan, masyarakat dan eksekutif berkonsultasi atas dasar rancangan APBD	SS	S	TT	TS	STS
19	Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan masyarakat	SS	S	TT	TS	STS
20	Saran dan kritik dari masyarakat Menurut saya , di jadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
21	Forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media yang efektif terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran	SS	S	TT	TS	STS
22	Pertemuan kelompok masyarakat, jajak pendapat, dan kajian media masa serta diskusi public efektif dalam Penyusunan RAPBD	SS	S	TT	TS	STS
23	Walupun belum ada fasilitas yang memadai dalam mengkomunikasikan perubahan APBD, tetapi dewan dan Pemda telah berkomitmen untuk tetap berupaya agar masyarakat dapat mengetahui perubahan APBD tersebut.	SS	S	TT	TS	STS
24	Menurut saya, penjangingan Aspirasi masyarakat merupakan suatu syarat yang harus dilakukan oleh pemda dalam proses penyusunan RAPBD	SS	S	TT	TS	STS

No	PERTANYAAN	SS	S	TT	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
25	Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi	SS	S	TT	TS	STS
26	Selama ini masyarakat mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran	SS	S	TT	TS	STS
27	Laporan pertanggung jawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu	SS	S	TT	TS	STS
28	Komplain dari masyarakat tentang perubahan anggaran direspon dan ditindaklanjuti	SS	S	TT	TS	STS
29	Dengan tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik, menurut saya dapat meningkatkan transparansi	SS	S	TT	TS	STS
30	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat	SS	S	TT	TS	STS
31	Perubahan kebijakan dalam APBD yang terjadi, biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi	SS	S	TT	TS	STS

32	Menurut saya meskipun suara/usulan rakyat diakomodasi, transparansi kebijakan publik tentang anggaran masih belum memenuhi asas transparansi.	SS	S	TT	TS	STS
33	Informasi yang diberikan kepada publik selama ini, menurut saya tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
34	Menurut saya, diperlukan tersedianya informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.	SS	S	TT	TS	STS

Transparansi Kebijakan Publik (X 3)

Pengawasan Keuangan daerah (APBD)

	PERTANYAAN					STS
0						(I)
35	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan	S		T	S	STS
36	Menurut saya, dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah, dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APBD	S		T	S	STS
37	Analisis politik , saya lakukan dalam rangka menyusun APBD	S		T	S	STS
38	Saya tidak seberapa berperan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD	S		T	S	STS
39	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun	S		T	S	STS
40	Dengan adanya tuntutan transparansi terhadap penggunaan dana APBD, menurut saya pengawasan penggunaan	S		T	S	STS
41	Sebagai anggota dewan, saya mempunyai hak untuk mengusulkan	S		T	S	STS
42	Pengesahan APBD belum menunjukkan	S		T	S	STS
43	Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah disahkan	S		T	S	STS
44	Dalam pengesahan APBD saya tidak	S		T	S	STS
45	Pengesahan APBD sudah memenuhi asas transparansi	S		T	S	STS
46	Jika masyarakat menanyakan APBD yang telah disahkan saya kesulitan menjelaskan	S		T	S	STS

47.	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD					STS
48.	Jika terjadi revisi anggaran dalam APBD saya kira wajar saja					STS
49.	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan	S		T	S	STS
50.	Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan saya					STS
51.	Saya menanyakan alasan adanya					STS
52.	Jarangsekali saya mengevaluasi laporan triwulanan/bulanan	S		T	S	STS
53.	Saya meminta keterangan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)	S		T	S	STS
54.	Penolakan terhadap LPJ Walikota/Bupati saya lakukan	S		T	S	STS
55.	Saya menanyakan LPJ APBD					STS
56.	Seperlunya saja saya meminta keterangan atas LPJ APBD yang	S		T	S	STS
57.	Jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD menurut saya, hanya karena	S		T	S	STS
58.	Saya aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Walikota/Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja	S		T	S	STS

1.Data Screening dan Transformasi Data

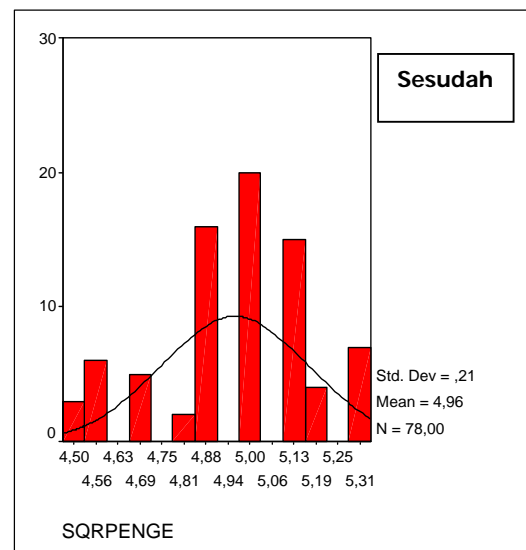
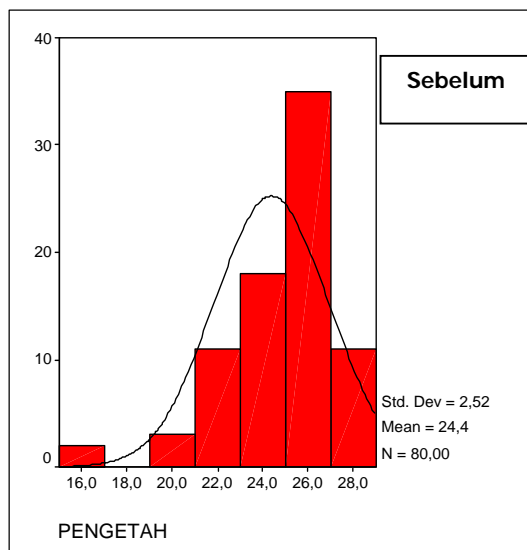
1.1.Uji normalitas data dengan Menggunakan Uji KS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		PENGETAH	PARTISIP	TRANSPAR
N		80	80	80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24,3750	33,8250	33,7250
	Std. Deviation	2,52268	4,45164	2,96381
Most Extreme Differences	Absolute	,216	,147	,141
	Positive	,122	,147	,096
	Negative	-,216	-,103	-,141
Kolmogorov-Smirnov Z		1,931	1,313	1,262
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001	,064	,083

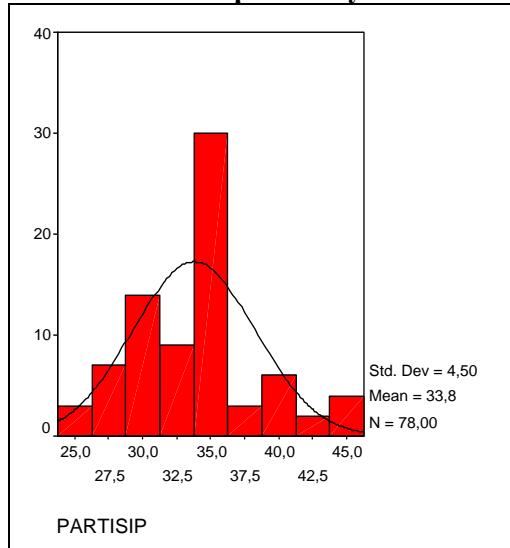
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. Uji normalitas dengan grafik.

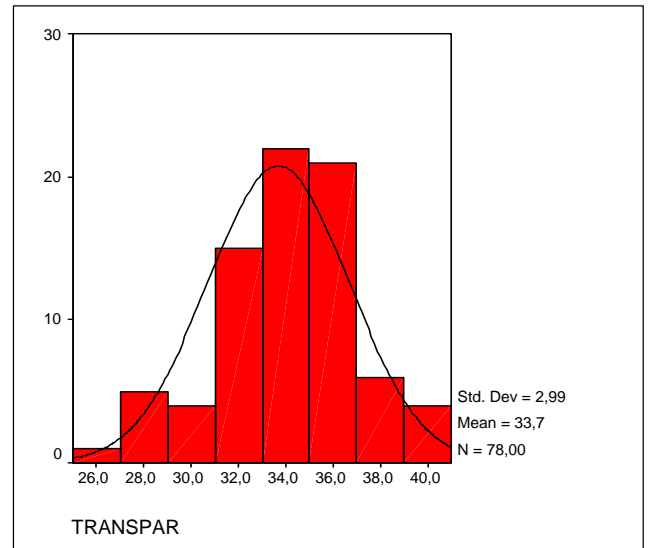
2.1.Grafik Pengetahuan Dewan Sebelum dan Sesudah dikeluarkan Data Outlier



2.2. Grafik Partisipasi Masyarakat



2.3. Grafik Transparansi Kebijakan Publik



2.4. Uji K-S setelah Data Outlier dikeluarkan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		PENGETAH	PARTISIP	TRANSPAR
N		78	78	78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24,6154	33,7692	33,6923
	Std. Deviation	2,04641	4,49509	2,99483
Most Extreme Differences	Absolute	,177	,159	,151
	Positive	,108	,159	,092
	Negative	-,177	-,097	-,151
Kolmogorov-Smirnov Z		1,560	1,404	1,336
Asymp. Sig. (2-tailed)		,015	,039	,056

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

3. Uji Reabilitas

3.1. Reliability Pengetahuan Dewan

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	Q4	4,1154	,8970	78,0
2.	Q5	4,2436	,5390	78,0
3.	Q6	4,5513	,5954	78,0
4.	Q7	3,2692	1,2657	78,0
5.	Q8	4,4231	,8299	78,0
6.	PENGETAH	24,6154	2,0464	78,0

Correlation Matrix

	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Q4	1,0000				
Q5	,3977	1,0000			
Q6	,1711	-,0192	1,0000		
Q7	,1439	,1120	-,1306	1,0000	
Q8	,2127	,2021	,1264	-,3200	1,0000
PENGETAH	,7178	,4039	,4321	,4015	,3953

N of Cases = 78,0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
----------------	------	----------	---------	----------------

Scale 45,2179 16,7181 4,0888 6

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
Alpha				
if Item Deleted				
Q4 ,5121	41,1026	12,0673	,6171	,6826
Q5 ,6063	40,9744	14,8305	,3847	,2366
Q6 ,6277	40,6667	15,2121	,2479	,5556
Q7 ,6610	41,9487	13,4259	,1822	,7013
Q8 ,6359	40,7949	14,7366	,2029	,6092
PENGETAH ,2175	20,6026	4,5283	,9188	,8840

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients 6 items

Alpha = ,6309 Standardized item alpha = ,6237

3.2. Reliability Partisipasi Masyarakat

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

	Mean	Std Dev	Cases
1. Q11	4,2436	,9423	78,0
2. Q13	4,4103	,5683	78,0
3. Q15	4,2564	1,0374	78,0
4. Q18	3,9872	1,1223	78,0
5. Q22	3,9103	,8855	78,0

6.	Q24	4,3718	,6858	78,0
7.	PARTISIP	33,7692	4,4951	78,0

Correlation Matrix

	Q11	Q13	Q15	Q18	Q22
Q11	1,0000				
Q13	,4415	1,0000			
Q15	,5995	,3039	1,0000		
Q18	,4942	,3341	,5048	1,0000	
Q22	,5713	,0741	,5767	,4040	1,0000
Q24	,3403	,0034	,3754	,3269	
PARTISIP	,3446	,2561	,3526	,3186	
,2264					

N of Cases = 78,0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of
Scale	58,9487	49,5038	7,0359	Variables 7

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation
Alpha if Item Deleted	if Item Deleted	if Item Deleted		
Q11 ,5045	54,7051	41,6132	,5760	,5482
Q13 ,5635	54,5385	46,5375	,3409	,3023
Q15 ,4968	54,6923	40,8392	,5723	,4960
Q18 ,5062	54,9615	41,0764	,4983	,3511
Q22 ,5301	55,0385	43,3881	,4571	,5330
Q24 ,5400	54,5769	44,6109	,4827	,3651
PARTISIP ,8016	25,1795	14,4609	,4340	,2472

Reliability Coefficients 7 items

Alpha = ,5773

Standardized item alpha = ,8036

3.3. Reliability Transparansi Kebijakan Publik

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	Q25	4,4744	,6974	78,0
2.	Q26	3,0641	,8427	78,0
3.	Q27	2,6923	1,1085	78,0
4.	Q28	3,6410	,8675	78,0
5.	Q29	4,1795	,5523	78,0
6.	Q30	4,4103	,4951	78,0
7.	Q31	3,7436	,7462	78,0
8.	Q34	4,1538	,8071	78,0
9.	TRANSPAR	33,6923	2,9948	78,0

Correlation Matrix

	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29
Q25	1,0000				
Q26	,2570	1,0000			
Q27	,2753	,6192	1,0000		
Q28	,1134	,3517	,3293	1,0000	
Q29	,3830	,0029	,0490	,1633	1,0000
Q30	,3694	,5899	,5880	,1962	
Q31	-,0627	,3982	,3273	,2773	-
Q34	,3532	-,2056	-,0045	-,2540	
TRANSPAR	,5620	,5894	,7261	,5368	

	Q30	Q31	Q34	TRANSPAR
Q30	1,0000			
Q31	,2533	1,0000		
Q34	,0025	-,1493	1,0000	
TRANSPAR	,5505	,3827	,3207	1,0000

N of Cases = 78,0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
Scale	64,0513	39,5038	6,2852	9

—

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
Alpha if Item Deleted				
Q25,7037	59,5769	34,9226	,4968	,5146
Q26,6877	60,9872	33,1297	,5839	,6701
Q27,6599	61,3590	29,9993	,6815	,7916
Q28,7052	60,4103	34,3490	,4329	,7322
Q29,7257	59,8718	37,2561	,2881	,6063
Q30,7073	59,6410	35,8435	,5761	,4801
Q31,7189	60,3077	35,9820	,3312	,4888
Q34,7400	59,8974	37,5997	,1266	,7854
TRANSPAR,6458	30,3590	11,3500	,9507	,9534

Reliability Coefficients 9 items

Alpha = ,7290 Standardized item alpha = ,7607

3.4. Reliability Pengawasan APBD

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	Q37	3,5769	,9469	78,0
2.	Q38	3,2949	1,0079	78,0
3.	Q39	4,6538	,4788	78,0
4.	Q44	2,6667	1,0278	78,0
5.	Q46	2,5513	,9622	78,0
6.	Q50	2,2051	,7621	78,0
7.	Q51	4,2179	,5259	78,0
8.	Q52	2,7949	1,1091	78,0
9.	Q55	4,5641	,5718	78,0
10.	Q56	3,2436	1,0713	78,0
11.	PENGAWAS	77,1282	5,9245	78,0

Correlation Matrix

	Q37	Q38	Q39	Q44
Q46				
Q37	1,0000			
Q38	-,0445	1,0000		
Q39	,2743	,2412	1,0000	
Q44	-,0801	,4096	,1320	1,0000
Q46	,1453	,1382	,1377	,3983
Q50	,1938	,1569	,2327	,4864
Q51	,1876	,0487	,0972	,2082
Q52	,1389	,0780	-,1354	,4291
Q55	,2786	,3386	,3904	-,0958
Q56	,1413	,4017	,1412	-,0432
PENGAWAS				

PENGAWAS ,4977	,3524	,5569	,4141	,5851
Q56	Q50	Q51	Q52	Q55
Q50	1,0000			
Q51	,3083	1,0000		
Q52	,3116	,3671	1,0000	
Q55	,0290	,4496	-,0200	1,0000
Q56	,0494	,0429	,0863	,2816
1,0000				
PENGAWAS ,5209	,4975	,4453	,5318	,3770

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

N of Cases = 78,0

Statistics for Scale	Mean 110,8974	Variance 104,4829	Std Dev 10,2217	N of Variables 11
-------------------------	------------------	----------------------	--------------------	-------------------------

Item-total Statistics

	Scale Mean Alpha if Item if Item Deleted Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation
Q37 ,3885	107,3205 ,6362	98,0128	,2973
Q38 ,5552	107,6026 ,6165	93,8270	,4937
Q39 ,4828	106,2436 ,6417	100,7321	,3664
Q44 ,7083	108,2308 ,6122	92,9331	,5296
Q46 ,5201	108,3462 ,6163	93,9955	,5125
Q50 ,3701	108,6923 ,6256	96,5794	,4889
Q51 ,5278	106,6795 ,6360	99,4154	,4568

Q52	108,1026	92,5348	,5023
,6309	,6121		
Q55	106,3333	99,9913	,3641
,5374	,6393		
Q56	107,6538	94,9046	,4039
,6426	,6236		
PENGAWAS	33,7692	20,2058	,9233
,9021	,6885		

Reliability Coefficients 11 items

Alpha = ,6495

Standardized item alpha = ,7851

4. Uji Validitas

4.1. Correlations Pengetahuan Dewan

Correlations							
		Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	PENGETAH
							AH
Q4	Pearson Correlation	1	,398**	,171	,144	,213	,718**
	Sig. (2-tailed)		,000	,134	,209	,062	,000
	N	78	78	78	78	78	78
Q5	Pearson Correlation	,398**	1	-,019	,112	,202	,404**
	Sig. (2-tailed)	,000		,868	,329	,076	,000
	N	78	78	78	78	78	78
Q6	Pearson Correlation	,171	-,019	1	-,131	,126	,432**
	Sig. (2-tailed)	,134	,868		,254	,270	,000
	N	78	78	78	78	78	78
Q7	Pearson Correlation	,144	,112	-,131	1	-,32**	,402**
	Sig. (2-tailed)	,209	,329	,254		,004	,000
	N	78	78	78	78	78	78
Q8	Pearson Correlation	,213	,202	,126	-,320**	1	,395**
	Sig. (2-tailed)	,062	,076	,270	,004		,000
	N	78	78	78	78	78	78
PENGETAH	Pearson Correlation	,718**	,404**	,432**	,402**	,395**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	78	78	78	78	78	78

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4.2. Correlations Partisipasi Masyarakat

Correlations								
		Q11	Q13	Q15	Q18	Q22	Q24	PAR TISI P
Q11	Pearson Correlation	1	,441**	,600**	,494**	,571**	,340**	,345**
	Sig. (2-tailed)	,	,000	,000	,000	,000	,002	,002
	N	78	78	78	78	78	78	78
Q13	Pearson Correlation	,441**	1	,304**	,334**	,074	,003	,256*
	Sig. (2-tailed)	,000	,	,007	,003	,519	,976	,024
	N	78	78	78	78	78	78	78
Q15	Pearson Correlation	,600**	,304**	1	,505**	,577**	,375**	,353**
	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,	,000	,000	,001	,002
	N	78	78	78	78	78	78	78
Q18	Pearson Correlation	,494**	,334**	,505**	1	,404**	,327**	,319**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,	,000	,003	,004
	N	78	78	78	78	78	78	78
Q22	Pearson Correlation	,571**	,074	,577**	,404**	1	,526**	,226*
	Sig. (2-tailed)	,000	,519	,000	,000	,	,000	,046
	N	78	78	78	78	78	78	78
Q24	Pearson Correlation	,340**	,003	,375**	,327**	,526**	1	,374**
	Sig. (2-tailed)	,002	,976	,001	,003	,000	,	,001
	N	78	78	78	78	78	78	78
PARTISIP	Pearson Correlation	,345**	,256*	,353**	,319**	,226*	,374**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,024	,002	,004	,046	,001	,
	N	78	78	78	78	78	78	78

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4.3. Correlations Transparansi Kebijakan Publik

Correlations

		Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q34	TRANSPAR
Q25	Pearson Correlation	1	,257*	,275*	,113	,383**	,369**	-,063	,353**	,562**
	Sig. (2-tailed)		,023	,015	,323	,001	,001	,585	,002	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q26	Pearson Correlation	,257*	1	,619**	,352**	,003	,590**	,398**	-,206	,589**
	Sig. (2-tailed)	,023		,000	,002	,980	,000	,000	,071	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q27	Pearson Correlation	,275*	,619**	1	,329**	,049	,588**	,327**	-,004	,726**
	Sig. (2-tailed)	,015	,000		,003	,670	,000	,003	,969	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q28	Pearson Correlation	,113	,352**	,329**	1	,163	,196	,277*	-,254*	,537**
	Sig. (2-tailed)	,323	,002	,003		,153	,085	,014	,025	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q29	Pearson Correlation	,383**	,003	,049	,163	1	,060	-,107	,141	,411**
	Sig. (2-tailed)	,001	,980	,670	,153		,604	,349	,218	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q30	Pearson Correlation	,369**	,590**	,588**	,196	,060	1	,253*	,003	,550**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,085	,604		,025	,983	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q31	Pearson Correlation	-,063	,398**	,327**	,277*	-,107	,253*	1	-,149	,383**
	Sig. (2-tailed)	,585	,000	,003	,014	,349	,025		,192	,001
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q34	Pearson Correlation	,353**	-,206	-,004	-,254*	,141	,003	-,149	1	,321**
	Sig. (2-tailed)	,002	,071	,969	,025	,218	,983	,192		,004
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78
TRANSPAR	Pearson Correlation	,562**	,589**	,726**	,537**	,411**	,550**	,383**	,321**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,004	
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4.4. Correlations Pengawasan APBD

Correlations

		Q37	Q38	Q39	Q44	Q46	Q50	Q51	Q52	Q55	Q56	PENGAWAS
Q37	Pearson Correlation	1	-,044	,274*	-,080	,145	,194	,188	,139	,279*	,141	,352**
	Sig. (2-tailed)		,699	,015	,486	,204	,089	,100	,225	,014	,217	,002
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q38	Pearson Correlation	-,044	1	,241*	,410**	,138	,157	,049	,078	,339**	,402**	,557**
	Sig. (2-tailed)	,699		,033	,000	,228	,170	,672	,497	,002	,000	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q39	Pearson Correlation	,274*	,241*	1	,132	,138	,233*	,097	-,135	,390**	,141	,414**
	Sig. (2-tailed)	,015	,033		,249	,229	,040	,397	,237	,000	,218	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q44	Pearson Correlation	-,080	,410**	,132	1	,398**	,486**	,208	,429**	-,096	-,043	,585**
	Sig. (2-tailed)	,486	,000	,249		,000	,000	,067	,000	,404	,707	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q46	Pearson Correlation	,145	,138	,138	,398**	1	,340**	,504**	,606**	,183	-,031	,498**
	Sig. (2-tailed)	,204	,228	,229	,000		,002	,000	,000	,109	,786	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q50	Pearson Correlation	,194	,157	,233*	,486**	,340**	1	,308**	,312**	,029	,049	,497**
	Sig. (2-tailed)	,089	,170	,040	,000	,002		,006	,005	,801	,668	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q51	Pearson Correlation	,188	,049	,097	,208	,504**	,308**	1	,367**	,450**	,043	,445**
	Sig. (2-tailed)	,100	,672	,397	,067	,000	,006		,001	,000	,710	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q52	Pearson Correlation	,139	,078	-,14	,429**	,606**	,312**	,367**	1	-,020	,086	,532**
	Sig. (2-tailed)	,225	,497	,237	,000	,000	,005	,001		,862	,452	,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q55	Pearson Correlation	,279*	,339**	,390**	-,096	,183	,029	,450**	-,020	1	,282*	,377**
	Sig. (2-tailed)	,014	,002	,000	,404	,109	,801	,000	,862		,013	,001
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Q56	Pearson Correlation	,141	,402**	,141	-,043	-,031	,049	,043	,086	,282*	1	,521**
	Sig. (2-tailed)	,217	,000	,218	,707	,786	,668	,710	,452	,013		,000
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
PENGAWAS	Pearson Correlation	,352**	,557**	,414**	,585**	,498**	,497**	,445**	,532**	,377**	,521**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	
	N	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Analisis Faktor

5.1. Factor Analysis Pengetahuan

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,505
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	35,579
	df	10
	Sig.	,000

Total Variance Explained									
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,6	32,0	31,95	1,6	32,0	31,95	1,5	30,6	30,56
2	1,3	26,9	58,86	1,3	26,9	58,86	1,4	28,3	58,86
3	,96	19,1	78,00						
4	,58	11,6	89,60						
5	,52	10,4	100,0						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
Q4	,822	,120
Q5	,794	2,999E-02
Q6	,113	,489
Q7	,358	-,777
Q8	,286	,746

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
Q4	,762	,330
Q5	,691	,392
Q6	,353	-,357
Q7	-,104	,849
Q8	,635	-,485

Extraction Method: Principal Component Analysis
a. 2 components extracted.

Component Transformation Matrix		
Component	1	2
1	,851	,526
2	,526	-,851

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

5.2. Factor Analysis Partisipasi

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,785
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	151,889
	df	15
	Sig.	,000

Total Variance Explained									
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3,05	51	50,77	3,05	51	50,77	2,26	38	37,58
2	1,14	19	69,78	1,14	19	69,78	1,93	32	69,78
3	,575	9,6	79,37						
4	,542	9,0	88,41						
5	,391	6,5	94,94						
6	,304	5,1	100,0						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
Q11	,513	,676
Q13	-,165	,890
Q15	,617	,537
Q18	,448	,593
Q22	,843	,205
Q24	,821	-3,72E-02

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
Q11	,828	,186
Q13	,448	,787
Q15	,817	1,309E-02
Q18	,724	,165
Q22	,776	-,386
Q24	,604	-,557

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Component Transformation Matrix		
Component	1	2
1	,765	,644
2	-,644	,765

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

5.3. Factor Analysis Transparansi.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,708
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	157,767
	df	28
	Sig.	,000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,78	34,76	34,8	2,78	34,76	34,8	2,59	32,39	32,4
2	1,68	21,03	55,8	1,68	21,03	55,8	1,48	18,52	50,9
3	1,06	13,24	69,0	1,06	13,24	69,0	1,45	18,12	69,0
4	,744	9,295	78,3						
5	,579	7,237	85,6						
6	,468	5,845	91,4						
7	,377	4,710	96,1						
8	,311	3,888	100						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
Q25	,382	,652	,411
Q26	,830	4,760E-02	-,223
Q27	,830	,106	-4,20E-02
Q28	,316	,398	-,671
Q29	-8,19E-02	,879	-4,04E-02
Q30	,823	,109	,114
Q31	,533	-,232	-,348
Q34	-1,42E-03	,217	,802

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
Q25	,435	,742	2,509E-02
Q26	,843	-,146	-9,25E-02
Q27	,818	2,317E-02	-,177
Q28	,544	-,198	,611
Q29	,152	,597	,633
Q30	,779	,136	-,278
Q31	,520	-,424	-9,42E-02
Q34	-,121	,719	-,399

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3
1	,943	,251	-,217
2	-,027	,710	,704
3	-,331	,658	-,676

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

5.4. Factor Analysis Pengawasan APBD

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,584
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	222,635
	df	45
	Sig.	,000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,901	29,007	29,007	2,901	29,007	29,007	2,086	20,859	20,859
2	1,813	18,134	47,141	1,813	18,134	47,141	1,735	17,352	38,211
3	1,352	13,517	60,658	1,352	13,517	60,658	1,688	16,881	55,093
4	1,050	10,499	71,156	1,050	10,499	71,156	1,606	16,064	71,156
5	,894	8,941	80,098						
6	,620	6,196	86,293						
7	,509	5,090	91,383						
8	,348	3,479	94,862						
9	,299	2,988	97,850						
10	,215	2,150	100,0						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
Q37	,192	-4,69E-02	,707	-8,64E-02
Q38	-2,42E-02	,406	-2,78E-02	,809
Q39	-,233	,402	,721	,188
Q44	,284	,832	-,188	,125
Q46	,766	,317	,126	7,054E-03
Q50	,269	,709	,248	-7,16E-02
Q51	,739	6,421E-03	,350	7,959E-02
Q52	,811	,242	-,177	2,599E-02
Q55	,220	-,191	,629	,519
Q56	4,658E-02	-,122	7,827E-02	,782

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.

Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
Q37	,335	,343	-,510	,236
Q38	,455	,348	,685	-,157
Q39	,379	,544	3,806E-02	,575
Q44	,616	-,405	,484	,217
Q46	,745	-,304	-,202	-,119
Q50	,634	-,199	9,363E-02	,433
Q51	,665	-1,47E-02	-,426	-,227
Q52	,632	-,482	-9,36E-02	-,327
Q55	,446	,683	-,219	-,197
Q56	,249	,532	,314	-,433

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4
1	,688	,538	,364	,325
2	-,385	-,299	,642	,592
3	-,399	,518	-,511	,557
4	-,469	,593	,441	-,483

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

6. Asumsi Klasik

6.1. Uji Multikolinieritas

Variables Entered/Removed ^b				Model Summary				
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	TRANSPAR, PENGETAH, PARTISIP ^a		Enter	1	,933 ^a	,871	,865	2,17398

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: PENGAWAS

a. Predictors: (Constant), TRANSPAR, PENGETAH, PARTISIP
b. Dependent Variable: PENGAWAS

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2352,981	3	784,327	165,954	,000 ^a
	Residual	349,737	74	4,726		
	Total	2702,718	77			

a. Predictors: (Constant), TRANSPAR, PENGETAH, PARTISIP
b. Dependent Variable: PENGAWAS

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	30,385	3,756		8,090	,000		
	PENGETAH	-,074	,127	-,025	-,577	,565	,903	1,107
	PARTISIP	1,147	,063	,870	18,343	,000	,777	1,287
	TRANSPAR	,292	,091	,147	3,202	,002	,826	1,211

a. Dependent Variable: PENGAWAS

Coefficient Correlations ^a					
Model			TRANSPAR	PENGETAH	PARTISIP
1	Correlations	TRANSPAR	1,000	-,072	-,380
		PENGETAH	-,072	1,000	-,253
		PARTISIP	-,380	-,253	1,000
	Covariances	TRANSPAR	8,289E-03	-8,404E-04	-2,161E-03
		PENGETAH	-8,404E-04	1,623E-02	-2,013E-03
		PARTISIP	-2,161E-03	-2,013E-03	3,910E-03

a. Dependent Variable: PENGAWAS

6.2. Uji Autokorelasi (DW)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,933 ^a	,871	,865	2,17398	1,745

a. Predictors: (Constant), TRANSPAR, PENGETAH, PARTISIP

b. Dependent Variable: PENGAWAS

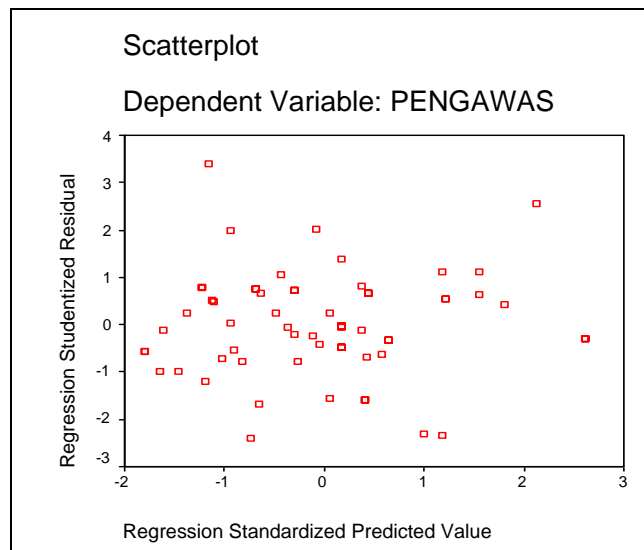
6.3. NPar Tests(Run Test)

Runs Test

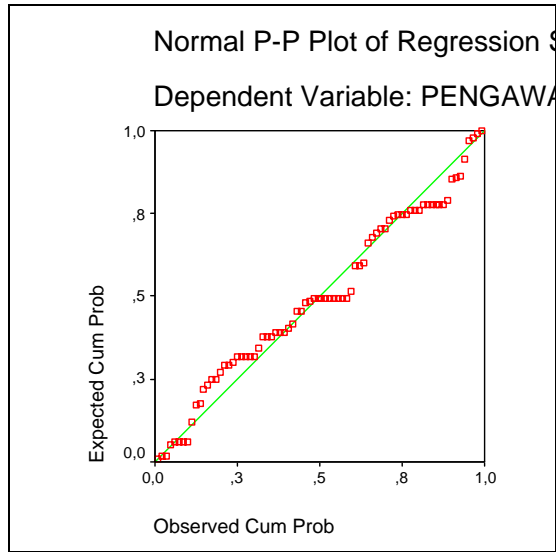
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,0393437
Cases < Test Value	37
Cases >= Test Value	41
Total Cases	78
Number of Runs	43
Z	,709
Asymp. Sig. (2-tailed)	,478

a. Median

6.4. Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik



6.5. Uji Normalitas dengan Grafik



6.6. Uji Normalitas dengan Menggunakan Analisis Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0033592
	Std. Deviation	2,13127875
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,103
	Negative	-,079
Kolmogorov-Smirnov Z		,907
Asymp. Sig. (2-tailed)		,383

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

7. Regresi

7.1. Regression Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dgn Pengawasan APBD oleh Dewan

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PENGETA H	,	Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: PENGAWAS

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,267 ^a	,071	,059	5,74763

a. Predictors: (Constant), PENGETAH

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	192,037	1	192,037	5,813	,018 ^a
	Residual	2510,681	76	33,035		
	Total	2702,718	77			

a. Predictors: (Constant), PENGETAH
b. Dependent Variable: PENGAWAS

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58,132	7,906		7,353	,000
	PENGETAH	,772	,320	,267	2,411	,018

a. Dependent Variable: PENGAWAS

7.2. Uji Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Pengawasan APBD oleh Dewan

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	MDX1X2X3, PENGETAH, TRANSPAR, PARTISIP, MDX1X2, MDX1X3		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PENGAWAS

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,937 ^a	,879	,869	2,14736

a. Predictors: (Constant), MDX1X2X3, PENGETAH, TRANSPAR, PARTISIP, MDX1X2, MDX1X3

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2375,325	6	395,888	85,854	,000 ^a
	Residual	327,393	71	4,611		
	Total	2702,718	77			

a. Predictors: (Constant), MDX1X2X3, PENGETAH, TRANSPAR, PARTISIP, MDX1X2, MDX1X3

b. Dependent Variable: PENGAWAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.						
	B	Std. Error	Beta								
1	(Constant)	-7,301	33,403								
	PENGETAH	2,476	1,848	,855	1,340	,184					
	PARTISIP	2,436	,854	1,848	2,852	,006					
	TRANSPAR	,150	1,291	,076	,117	,908					
	MDX1X2	-8,07E-02	,038	-1,974	-2,125	,037					
	MDX1X3	-2,43E-02	,067	-,442	-,365	,716					
	MDX1X2X3	8,370E-04	,001	,888	1,222	,226					

a. Dependent Variable: PENGAWAS